PRO-KONTRA KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK
(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur)

SKRIPSI

KEMENTERIAN PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu
Prodi Politik Islam (PI)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U-2010 011 P1
No REG : U-2010/P1/011
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

SAIFULLAH
NIM. E04206002

PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh
Saifullah
Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing,

ANDI SUWARKO, M.SI
NIP : 197411102003121004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Saifullah ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan diterima untuk memenuhi salah satu dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Politik Islam

Surabaya, 09 Agustus 2010

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ma'shum, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Ketua,

Andi Suwarko, M.Si
NIP. 197411102003121004

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji I,

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji II,

Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAKSI

Skiripsi ini mengkaji permasalahan tentang pro kontra keterlibatan kiai dalam politik di Kelurahan Tonjung Burneh Bangkalan

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini di fokuskan pada beberapa persoalan, yaitu: pertama, bagaimana manifestasi keterlibatan kiai dalam kegiatan Politik di Kelurahan Tonjung Burneh. Dalam hal ini menjelaskan tentang wujud politik kiai Kedua, Mengapa keterlibatan kiai dalam politik memunculkan pro kontra di masyarakat Kelurahan Tonjung Burneh. Dalam hal ini menjelaskan tentang masyarakat yang mendukung kiai dalam politik dan masyarakat yang kontra atau menginginkan kiai tidak ikut politik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, dalam mencari data di lapangan, peneliti bersandar kepada beberapa teori, seperti teori kepemimpinan karismatik, teori hegemoni dan teori pertukaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk pendekatan yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan deepth interview, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, manifestasi keterlibatan kiai dalam politik yang meliputi, pengurus partai, kiai yang dimaksud disini menjadi pengurus partai, mencalegkan diri yaitu kiai yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan dan partisipan kiai hanya memberi fatwa politik. Kedua, keterlibatan kiai dalam politik menuai pro kontra. Ketiga, implikasi keterlibatan kiai dalam politik yakni negatif dan positif.

Kata Kunci : Kiai dan Politik, Partisipasi Politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAKSI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DARTAR TABEL xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaan Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Telaah Kepustakaan 10
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : PEMBAHASAN

A. Konsep kiai 21
a. Pengertian Kiai 21
b. Peran Dan Fungsi Kiai 27
c. Relasi Dengan Masyarakat 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Politk 33
a. Klasik 33
b. Kelembagaan 34
c. Kekuasaan 34
d. Fungsionalisme 35
e. Konflik 35
C. Partisipasi 41
D. Kiai Dan Politik 45
E. Teori Hegemoni 49
F. Teori Kepemimpinan 51
G. Teori Pertukaran 53

BAB III : SETTING PENELITIA

A. Monografi Desa Tonjung 57
1. Geografi 57
2. Demografis atau Kependudukan 59
3. Kondisi Sosial Budaya 60
4. Kondisi Keagamaan 61
5. Pendidikan 64
6. Ekonomi 66
7. Politik 67
B. Tipologi Kiai 69

BAB IV : ANALISA DATA

A. Tipologi Manifestasi Politik Kiai 74
a. Pengurus Partai 75
b. Mencalegkan Diri 79
c. Partisipan 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pro Kontra Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kiai Dalam Politik ٩6
1. Pro (Mendukung) ٩6
2. Kontra ٩9
3. Implikasi ١04

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel :

Tabel 1.1 Pola Luas Wilayah Kelurahan Tonjung 58

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 59

Tabel 1.3 Stratifikasi Masyarakat Kelurahan Tonjung Menurut Usia..... 60

Tabel 1.4 Komposisi Pemeluk Agama..... 62

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Ibadah 62

Tabel 1.6 Jumlah Kiai di Kelurahan Tonjung..... 64

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia 65

Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan 65

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian 66

Tabel 1.10 Rekapitulasi Perolehan Kursi Pileg TK. II Dapil 2 meliputi Kec Burneh 67

Tabel 1.11 Hasil Pemilihan Gebenur dan Wakil Gubenur Jatim 2008..... 67

Tabel 1.12 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Cagub dan Wacagub Jatim Putaran Kedua 2008. 68

Tabel 1.13 Perolehan Suara Calon Preseden dan Wakil Preseden 68

Tabel 1. 14 Bentuk Partisipasi Politik Kiai..... 74

Tabel 1. 15 Bentuk Hirarki Partisipasi Politik Kiai 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan konstelasi politik secara fundamental. Bergulirnya angin reformasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa partai Islam tampaknya memberi angin segar bagi posisi ulama Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai telah membuka peluang bagi partisipasi dari berbagai elemen masyarakat secara luas, terutama kalangan kiai. Kiai menjadi sosok yang memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik semacam ini.[1]

Di mata masyarakat, kiai adalah sosok yang kepadanya segala keluh kesah ditumpahkan, petuah kiai adalah obat bagi setiap problem masyarakat dalam hal apapun. Tidak hanya dalam persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan ekonomi, pertanian, nafkah hidup, hingga persoalan-persoalan rumah tangga, sosok kiai begitu dekat di hati masyarakat. Pintu rumah kiai laksana masjid yang kapanpun orang datang bertamu selalu terbuka napas dan detak jantung kiai adalah pengabdian bagi kemaslahatan dan kebahagiaan masyarakat, kiai adalah air sumur yang memberi kesegaran bagi musafir yang dahaga di bawah terik matahari,

[1] Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kiai adalah pewaris para Nabi, namun realita ke kiaian kini telah jauh berubah banyak kiai yang bergerombol antri menceburkan diri ke dunia politik, dunia yang penuh intrik dan sarat dengan kekentalan sistem yang korup.[2]

Keterlibatan kiai dalam wilayah politik kekuasaan melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat yang pro berpendapat, bahwa keterlibatan kiai dalam politik bermanfaat paling tidak karena dua hal. Medan dakwah kiai semakin luas tidak hanya di wilayah kultural seperti biasanya, tetapi juga merambah wilayah struktural, hadirnya kiai dalam politik kekuasaan akan memberi arti bagi kekuasaan itu sendiri karena ia "terspritualisasi" kekuasaan akan dijadikan sarana pengabdian kepada Tuhan untuk kemudian diabdikan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.[3]

Tetapi yang kontra sebaliknya berpendapat bahwa keterlibatan kiai dalam wilayah politik kekuasaan justru menjadikan kerja-kerja kultural kiai terabaikan, kiai yang selama ini fokus di wilayah kultural seperti melakukan pendidikan (keagamaan) kepada masyarakat, melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang menyimpang, mulai tak terurus karena energi kiai terserap sepenuhnya untuk politik kekuasaan, apalagi sistem kekuasaan saat ini sangat korup sehingga bukan mustahil kiai bisa terjebak dalam sistem yang korup tersebut. Oleh karena itu

---

[2] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa* (Jokjakarta: IRCiSOD, 2009) h. 8

[3] A. Dardiri Zubairi *Kiai politik, politik Kiai* *http://masdardiri.wordpress.com/2009/02/26/selamat-datang/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pandangan yang kontra, sebaiknya kiai di wilayah kultural saja sambil menyuarakan kebenaran dari luar struktur.[4]

Kiai yang oleh kalangan masyarakat jawa, masih sering diperdebatkan lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik, pro-kontra seputar peran kiai dalam politik praktis masih menjadi perbincangan dalam masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kiai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik, adapula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kiai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.[5] Namun persoalan yang cukup pelik adalah ketika elit agama atau kiai memainkan peran ganda antara agamawan disatu sisi menjadi politikus disisi lain yang diperankan dalam waktu yang bersamaan. Muncul pertanyaan apakah mungkin produk-produk pemikiran dan tindakan elit agama bisa bebas dari nilai-nilai yang mewarnai pandangan hidup mereka[6]

Dari persoalan tersebut, sebenarnya ada sebagian masyarakat yang mengharapkan posisi dan peran kiai berdiri independent tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar bingar dan panasnya perpolitikan. Kehadiran kiai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi moral force dalam

---

[4] *Ibid*

[5] Imam Suprayoga, *Kiai Dan Politik* (UIN MALANG, 2009) h.1

[6] Arjuna Dewex http:*lkehadiran kiai independen dalam dinamika sosial-politik* //yazoulah.blogspot.com/2009/03/kehadiran-kiai-independen-dalam.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain ada pula sebagian masyarakat yang mengharapkan peran kiai atau elit agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia.[7]

Di sisi lain keikut sertaan kiai dalam pencaturan politik praktis peran kiai sangat signifikan, di dalam agama islam kiai merupakan sosok seorang tokoh yang mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan berpengaruh di lingkungan masyarakat tersebut karena kiai memiliki pengetahuan yang luas khususnya tentang agama Islam.[8] Pada titik inilah bisa dilihat peran kiai khususnya dalam aspek sosial politik di negeri ini.

Pertama; faktor posisi sosial kiai yang menurut studi-studi tedahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat studi yang dilakukan Horikoshi (1978) misalnya, menunjukkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya.

Dalam tatanan sosial, kiai tak hanya memiliki peran mengayomi dan menjadi rujukan atas setiap masalah masyarakat yang dihadapi, akan tetapi juga memerankan diri sebagai orang yang membangun budaya. Pada masa-masa awal pendirian pesantren, kiai mengemban misi transformatif, yaitu mengubah sturuktur dan kultur masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu,

---

[7] *Ibid*

[8] Miftah Faridl, *Jurnal Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, 6 Agustus 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai-kiai dahulu biasanya mendirikan pesantren di tempat-tempat rawan atau bisa disebut dengan 'daerah hitam'. Kiai mengemban tanggung jawab syiar bagaimana mampu mengubah tatanan nilai dan kultur yang bobrok menuju yang lebih islami dan manusiawi.[9]

Sementara Geertz (1960) menunjukkan kiai sebagai makelar budaya *(cultural brokers)* dan menyatakan bahwa pengaruh kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini, meskipun secara politis kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

Dalam posisi itulah kiai nyatanya telah mampu membuktikan sebagai dalam bahasa Van Bruinessen *cultural broker* (pembangunan budaya). Nyaris segala informasi dan pengetahuan yang beredar di tengah masyarakat menjadikan kiai sebagai rujukan utama atas segala persoalan dan informasi yang berkembang di masyarakat.[10]

Dalam banyak contoh yang demikian itu kerap berhasil dilakukan kiai. satu contoh, KH. Hasyim Asy'ari yang mampu mengubah sebuah wilayah rawan menjadi kompleks atau wilayah pendidikan dengan masyarakatnya yang kalau

---

[9] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa* (Jokjakarta: IRCiSOD, 2009) h, 61

[10] Ibid...h, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai klasifikasi Cliffort Geertz nyantri. Beliau mampu menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.[11]

Posisi dan eksistensi kiai, seperti kiai Hasyim Asy'ari, sangat jelas dan dirasakan oleh masyarakat. Beliau ada untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta sama sekali tidak diarahkan untuk menyalahi nilai-nilai kekiaian. KH Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai yang berjuang bersama beliau adalah tipologi kiai organic yang mampu menafsirkan kebutuhan masyarakat sebagai proyek utama dalam kehidupan mereka.[12]

Kedua; faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya, sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kiai dipandang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik, dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikut.[13]

Setidaknya, dua dimensi sosial itulah yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan pengaruh yang dimiliki ulama di tengah-tengah masyarakat, yang lantas juga dijadikan sebagai amunisi politik oleh beberapa pihak di luar komunitas ulama, atau bahkan dari kalangan ulama sendiri, yang demi kepentingan dan ambisi pribadi.

---

[11] Ibid...h, 62
[12] Ibid...h, 63
[13] Miftah Faridl, *Jurnal Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, 6 Agustus 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi jelas posisi kiai tidak hanya terbatas sebagai agamawan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan mayarakat. Kiai betul-betul berintegrasi dalam semua dimensi hidup masyarakat, sehingga tidak heran kalau kreatifitas dan partisipasi para ulama pada masa-masa lalu.

Salah satu alasan peneliti menarik untuk mengangkat tema pro kontra kiai dalam politik karena selama ini belum ada yang mengangkat permasalahan terkait pro kontra kiai dalam politik sehingga membuat kiai tidak tahu bahwa sebagian pengikutnya menginginkan kiai tidak usah ikut politik (kontra) dan ada yang menginginkan kiai ikut politik (pro) kenyataannya ketika peneliti terjun kelapangan tempat penelitian diadakan ternyata keberadaan kiai dalam politik menuai pro kontra, lantas inilah yang menjadi alasan peneliti untuk membahasnya. Agar kiai yang akan atau terlibat dalam politik praktis berfikir kembali karena konsekuensi kiai ikut politik berdampak positif dan negatif.

Sedangkan pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Tonjung karena di Kelurahan Tonjung masyarakatnya agamis dan banyak pesantren dan sebagian besar kiainya banyak ikut politik bahkan ada sebagian kecil kiai yang sangat apatis terhadap politik. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manifestasi keterlibatan kiai dalam kegiatan politik di Kelurahan Tonjung Burneh?
2. Mengapa keterlibatan kiai dalam politik memunculkan pro kontra di masyarakat Kelurahan Tonjung Burneh?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan manifestasi keterlibatan kiai dalam kegiatan politik di Kelurahan Tonjung Burneh
2. Untuk menjelaskan keterlibatan kiai dalam politik memunculkan pro kontra di masyarakat Kelurahan Tonjung Burneh.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengkayaan dan pengembangan konsep, teori perspektif, obyek dalam disiplin ilmu politik, khususnya terkait dengan kiai dan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, konsideran, bagi kiai maupun masyarakat terkait dengan konsekuensi kiai yang akan atau terlibat dalam politik praktis

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami proposal ini, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut:

Kiai adalah Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren, ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Menurut asal usul, perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat: umpamanya, "Kiai Garuda Kencana" dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.

2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

3. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut orang *alim* (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).[14]

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[15]

F. Telaah Pustaka

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah

1. Ibnu Hajar, 2009 *Kiai Di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa.* IRCiSOD. Jogjakarta, buku ini membahas tentang banyaknya kiai yang hijrah ke politik sehingga membuat masyarakat yang berada di pelosok desa tampaknya kesepian akan nasehat dan petuah penyejuk hati dari sosok kiai

2. Imam Suprayoga. 2007. *Kiai Dan Politik Membaca Citra Politik Kiai.* UIN Malang press. Malang, Buku ini membahas jejak-jejak politik kiai dalam berpolitik, posisi kiai yang terlibat dalam partai politik sehingga membuat citra kiai sedikit menurun dalam pandangan santri

---

[14] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.55

[15] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo,1992), h.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Achmad Patoni, 2007 *Peran Kia Pesantren Dalam Partai Politik* , Pustaka pelajar. buku ini membahas peran kiai pesantren dalam kancah era politik reformasi, pertama peran kiai membimbing dan menjadi panutan para santri kedua pandangan kiai dalam aktivitas politik memperjuangkan kepentingan sebagai kemaslahatan umat melalui kekuasaan

4. Suherman ja'far, 2009 *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*, Kanisius. menurut penulis buku ini membahas pada sisi pasang surut dari keterlibatan peran kaum sarungan dalam kancah politik nasional Indonesia. Pembahasan buku ini bisa di jadikan pelajaran yang berharga dan layak untuk jadi renungan sejarah bagi para kiai yang sudah terjun dalam politik dan mungkin akan terjun dalam politik praktis agar tidak terjebak dalam politik yang tidak sehat atau menyesatkan.

5. Endang Turmudi. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.* LKIS: Jogjakarta. Menurut penulis kiai memiliki otoritas keagamaan, yang diikuti oleh santri. Runtuhnya Orde Baru membawa kebebasan ber-demokrasi. Sehingga membuka peluang bagi kiai untuk masuk ke sistem politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Fahman, Mundzar. 2004. *Kiai dan Korupsi* : *Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi.* JP Press: Surabaya. Keterlibatan Kiai dalam merespon para pelaku korupsi, juga merespon kiai yang terjerat korupsi.

7. Badaruddin, *Kepribadian Kiai Dalam Pondok Pesantren.* Jurnal Wacana *vol v No 1 Maret 2005* Jurnal ini membahas keseharian kepribadian kiai dengan santri, ustadz dan masyarakat

8. Sukamto. *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren.* LP3ES, Jakarta, 1999. Menurut penulis Buku ini membahas kepemimpinan dan struktur kekuasaan kiai dari sudut pandang sosiologis yang arah perkembangannya sering ditentukan oleh perjalanan masyarakat dan sama sekali bukan dari pesantren.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki[16]

Jenis penelitiaan

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu [17]

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Karena penelitian deskriptif kualitatif bersifat integral, artinya bisa menangkap gejala-gejala secara utuh sehingga metode ini tepat untuk menggali data yang diharapkan oleh peneliti

2. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini kevaliditasan data dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan dalam metode tersebut ada teknik pemeriksaan keabsahan data

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 20

[17] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sumber Data*

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian. *Informan* penelitian merupakan orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data atau disebut juga yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak sebuah penelitian berdasarkan informasi yang di berikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ***Teknik snowball Sampling*** di gunakan apabila peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, peneliti bisa secara langsung datang memasuki lokasi, dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya dimulai dari informasi kunci (*key informan*). Dari inilah informan-informan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain didapatkan[18] jumlah informan yang dibutuhkan, yaitu 23 orang yang diklasifikasi antara lain:

(a) 5 Santri Pesantren di Kelurahan Tonjung

(b) 10 Masyarakat Kelurahan Tonjung Burneh meliputi:

1. 4 Tokoh Masyarakat
2. Warga Petani, Pedagang

(c) 10 Kiai Pesantren di Kelurahan Tonjung

Jumlah Informan dapat di tambah jika data belum mencukupi kebutuhan. Tingkat kejenuhan data akan menjadi pembatasan akhir jumlah subyek penelitian. Unit analisa penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tonjung Burneh

Adapun data primer dalam penelitian berasal dari warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah Kelurahan sebagai *informan.*

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerapan suatu teori.

---

[18] Lihat Skiripsi Nurul Widayati,*Upacara Keleman dan Pandangan Masyarakat Islam di Kelurahan Plaosan Wonuayo Sidoarjo* Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah dengan buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian seperti

1. *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia.* Faridl Miftah, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11, 6 Agustus 2007
2. *Memahami Ilmu Politik,* Ramlan Subakti. (PT Grasindo, Jakarta,1992).
3. *Kiaipolitik,politikKia* Buka.http://masdardiri.wordpress.com/2009/02/26/selamat-datang/.
4. *Kehadiran Kiai Independen Dalam Dinamika Sosial-Politik/* Buka./yazoulah.blogspot.com/2009/03/kehadiran-kiai-independen-dalam.htm
5. *Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka, dan Kuasa.* Ibnu Hajar (jogjakarta. IRCiSOD, 2009)
6. *Kiai dan Politik Membaca Citra Politik Kiai.* Imam Suprayoga, (UIN Malang press. Malang, 2007)
7. *Peran Kia Pesantren Dalam Partai Politik.* Achmad Patoni, (Jogjakarta. Pustaka pelajar 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Kiai dan Korupsi* : *Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi.* Fahman, Mundzar. (JP Press: Surabaya. 2004)

9. *Kepribadian Kiai Dalam Pondok Pesantren.* Badaruddin, Jurnal Wacana *vol v No 1 Maret 2005.*

10. *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren,* Sukamto, LP3ES, Jakarta, 1999.

11. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai,* Zamakhasyari Dhofier, LP3ES,Jakarta, 1982

12. *Peran Ulama Dalam Pesantren Dalam Perjuangan Politik Islam Indonesia.* Abdul Qadir Djaelani, PT Bina Ilmu, Surabaya,1994

3. *Metode Pengumpulan Data*

a) Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini peneliti bebas melakukan atau bebas memilih apa yang kita amati. Data yang diambil haruslah data yang terperinci sesuai dengan keadaan di lapangan serta konteks di mana kegiatan-kegiatan terjadi atau berlangsung dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Wawancara Mendalam* (In-depth interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[19]

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memilih informan yang memahami keadaaan dan kondisi yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan agar peneliti dalam melakukan penelitian tidak tejadi pemanipulasian data, yang berakibat bermasalah dalam penelitiaan.

c) *Dokumentasi*

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record,* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.[20] Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.[21] Dokumen jenis ini bisa berupa buku biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang

---

[19] Ivan Afriani HS, "Metode Penelitian Kualitatif", http://www.penalaran-unm.org (17 Januari 2009)

[20] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,*(Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007), hal. 216 - 217

[21] *Ibid*... 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.[22]

4. *Metode Analisa data*

Metode analisa data yang digunakan adalah Metode analisa kualitatif versi Matthew B. Miles & A. Michael Huberman yaitu:

Pertama, Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, abstraksi dan tranformasi data kasar yang di peroleh di lapangan studi.

Kedua, Penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan menjadi pernyataan, penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif

Ketiga, Verifikasi penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar benar di peroleh konklusi yang valid dan kokoh.[23]

---

[22] *Ibid*...,219

[23] Lihat Matthew B.Miles & A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* , yang di pertegaskan dalam bukunya Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,*(jogjakarta: jogjakarta.2006)hal, h.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Proposal ini di susun dengan sistematika bab per bab yang masing-masing bab mengandung sub bab yang mana satu dan yang lainya memiliki hubungan yang erat. adapun struktur pembahasanya tersebut:

Bab I : Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, telaah pustaka, metode penelitian. dan sistematika pembahasan

Bab II : Kerangka konseptual dan teoritik, kiai dan politik

Bab III : Setting Penelitian:

a. Monografi Kelurahan Tonjung burneh: Geografis, Demografis, atau Kependudukan, Sosial dan Agama, Pendidikan, ekonomi dan politik.

b. Tipologi Kiai di Kelurahan Tonjung burneh

Bab IV : Analisa Data

Bab V : Kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL DAN TOERITIK

A. Konsep Kiai

1. Pengertian Kiai

Kata kiai sering rancu saat harus berhadapan dengan kata sejenis. Misalnya dengan kata ulama. Kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *al aliim* yang berarti memiliki pengetahuan. Selain bentuk jama' dari kata *al alim*, juga diambil dari kata a*l aliim* yang berarti mengetahui secara jelas. Makna kata *al ulama* dan *al alimun* berbeda dengan kata *al ulama* adalah jama' taksir dari kata *al alim*, sedangkan kata *al alimun* adalah jama' mudzakar salim dari kata *al alim.* Kata *al ulama* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali, sedangkan kata *al alim* terdapat 13 kali.[24]

Syekh Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait dengan ulama. Dengan mengacu kepada surat al-Fatir 28, "*Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama*", Takut disesuaikan dengan kadar pengetahuan takutnya. Orang berilmu akan mengetahui Allah dan ia akan takut dan berharap kepadanya. Ini merupakan dalil bahwa orang *alim* (berilmu) itu lebih tinggi derajatnya dari pada *abdi* (ahli ibadah).

---

[24] Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Qira'at yang menasabkan kalimat *al ulama* dan merafa'kan kalimat *al-jallah* ayat ini mempunyai arti bahwa Allah mengagumkan para ulama.[25]

Dari segi konsepsional, ada perbedaan tajam antara istilah ulama dan kiai. Sebutan kiai lahir dari kesepakatan sosial yang sudah lazim di masyarakat, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dalam perkembangan berikut istilah itu sudah di nisbatkan sebagai ahli agama. Lain halnya dengan istilah ulama', yang cenderung bersifat tekstual, yang ruang lingkup pengertiannya bersumber dari rujukan wahyu Tuhan. Al-Qur'an surat al-Fatir, ayat 68 menyebutkan kata *ulama*, dengan ungkapan: *Innama yakhsya allah min ibaadibil ulama,* kemudian diperkuat oleh sabda Nabi: *Al-Ulama' warosatul Ambiya'*. Karena para kiai adalah orang yang berilmu agama dan mengajarkan kepada masyarakat, maka status kiai di pondok pesantren menjadi identik dengan sebutan ulama.[26]

Pengertian ulama yang mengacu kembali kepada penegasan al-Qur'an adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu membaca alam dan dampak dari pada bacaannya tersebut menimbulkan sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu, *ulama* adalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. Artinya, seorang *ulama* adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang baik.[27]

---

[25] *Ibid.*, 37-38

[26] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (Jakarta, LP3ES,1999), 87

[27] Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sedangkan dalam istilah yang berkembang di kalangan umat Islam, *ulama* diartikan sebagai yang ahli agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta ber *akhlakul karimah* dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.[28] Rasullullah memberikan gambaran mengenai ulama dengan sifat-sifatnya yaitu: *ulama* adalah hamba Allah yang berakhlak Qur'ani yang menjadi *warasatul ambiya'* (pewaris para nabi), menjadi *qudwah* (pemimpin dan panutan), khalifah pengemban amanat Allah, penerang bumi memelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia.[29]

Kiai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren, dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran agama. Kiai juga mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah dari desa kedesa, menyampaikan fatwa agama kepada masyarakat luas[30]. selain itu kiai mendapat sebutan. *Ulama'* yaitu, orang yang selama hidupnya dengan khusuk menjalankan ibadah Allah, juga mendalami ilmu pengetahuan agama dan memiliki kewenangan dalam menafsirkat Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk menjadi rujukan masyarakat umum[31].

---

[28] Lihat Skripsi Ainur Rofiq, *Peran Kiai dalam Perubahan Sosial Politik pada masyarakat Sumber anyar Situbondo*. (Fakultas Dahwah,2006), 13

[29] Abdul Qadir Djaelani, Peran Ulama Dan Santri Dalam Perjalanan Politik Islam Di Indonesia, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994), 3-4

[30] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (LP3ES, Jakarta, 1999), 85

[31] *Ibid.*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita sering menemukan mitos yang beredar di masyarakat bahwa desa yang di tempati kiai menjadi tentram, aman dan berkah. Lantaran itu keberadaan kiai sangat dihormati. Kedudukan kiai di pesantren adalah pemimpin tunggal, memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan agama. Tidak ada figur yang dapat menandingin kekuasaan kiai kecuali figur kiai yang lebih tinggi kharismanya.[32]

Kajian awal terhadap posisi kiai dalam masyarakat Indonesia dilakukan oleh Zamakhsari Dhofir. Menurut Dhofir kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab kitab klasik kepada para santrinya.[33]

Seorang pengamat asal Prancis, Andree Feillard, memiliki perspektif yang berbeda. Kiai dalam makna spesifik, yakni seorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Feillard menyatakan bahwa sekarang kata kiai memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai ekspresi rasa hormat. Namun demikian, kata kiai telah mengalami orientasi, karena banyak dari mereka yang belum masuk kriteria untuk disebut sebagai kiai, ternyata telah menyandang gelar

---

[32] *Ibid.*, 88

[33] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren:Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, 1982), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai. Misalnya orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang benar[34]

Jika kita cermati dan komparasikan dengan realitas yang ada dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, nampaknya apa yang dinyatakan oleh Feillard ini tidak sepenuhnya benar sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa kenyataannya seperti itu. Pernyataan Feillard mungkin bisa terjadi, terutama pada daerah yang telah mengalami penggeseran peran kiai. Tetapi itupun tidak pada semua daerah. Sebab, tidak semua daerah telah terjadi penggeseran rasa hormat terhadap kiai.[35]

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Menurut asal usulnya, perkataan kiai berasal dari bahasa jawa. Kata ini, kemudian Dhofir dipakai untuk tiga jenis gelar.[36]

Pertama: kiai merupakan sebutan untuk benda benda pusaka atau barang terhormat.

Kedua: kiai ditujukan kepada orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat terkait dengan posisinya sebagai figur yang terhormat di mata masyarakat. Jadi gelar ini diberikan kepada sang tokoh.

---

[34] Andree Feillard. NU Vis a Vis Negara,LKIS,1999, 356 yang di pertegas dalam bukunya Achnad patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 23

[35] *Ibid*...., 23

[36] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren:Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* , hal. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga: gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam. Selain itu kiai juga harus memiliki pesantren, serta mengajarkan kitab kuning.

Pembagian atau kategorisasi kiai yang dilakukan Dhofir ternyata tidak mampu sepenuhnya mewadai luasnya penggunaan gelar kiai. Dalam perkembangan sosial sekarang ini, gelar kiai ternyata tidak dilekatkan kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugrahkan kepada figur ahli agama, ataupun ilmuwan Islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren.[37]

Kiai sebagai *warasatul ambia'*, mempunyai tanggung jawab yang besar dan panggilan tugas moral karena paling tidak kiai itu mempunyai fungsi sebagai pemimpin dan panutan umat, kiai harus tetap membuka dan mengkaji agar terbuka cakrawala keilmuan yang luas. Kiai harus tetap mendengar, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat mampu memberikan payung pada semua kelompok elemen masyarakat merasa terayomi.[38] Dalam konteks pesantren kiai merupakan figur sentral yang menentukan maju mundurnya pesantren secara keseluruhan. Karena dalam sejarah pesantren tertua di jawa kiai adalah dikenal sebagai pendiri, pemilik, dan sekaligus pendidik (guru) bagi para santri yang menuntut ilmu pengetahuan keagamaan di pesantren. (Dhofier, 1994)

---

[37] Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* , 23

[38] Badaruddin, *Kepribadian Kiai Dalam Pondok Pesantren.* (Jurnal Wacana, Maret, 2009), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran dan Fungsi Kiai

1) Da'wah dan penegakan Islam membentuk kader penerus:[39]

   a. Memimpin dan menggerakkan pelaksanaan "iqomaduddin. Yaitu menanamkan dan memperkuat aqidah tauhidullah serta membebaskan manusia dari kemusyrikan,

   b. mengatur dan melaksanakan dakwah Islamiah terhadap semua lapisan masyarakat, menyelenggarakan dan mengembangkan dakwah Islamiah, ta'lim, tarbiah dan tazkiah dan hikmah secara meluruh dan sempurna

   c. dan menyelenggarakan dan pembentukan kader penerus perjuangan iqomaduddin

2) Pengkajian Islam dan pengembangannya.

   a. Senantiasa menggali ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah

   b. Menemukan dan mengemukakan gagasan baru Islami untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

3) Perlindungan dan Pembelaan terhadap Islam dan ummat Islam.

   a. Mencintai dan melindungi dhuafa, fuqara, dan masakin.

   b. Memperjuangkan dan membela kepentingan Islam dan umat Islam.

   c. Membela dan melindungi Islam dan umat Islam dari setiap rongrongan dan usaha-usaha pelunturan ajaran dan aqidah Islam.

---

[39] Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama Dan Santri Dalam Perjuangan Islam di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran-peran kiai yang diatas hanya berupa pemetaan saja. Sementara, tugas sebenarnya cukup kompleks dan nyaris meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat, dan yang paling penting disinggung ialah bahwa kiai tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan, dimana tugas pokoknya adalah membangun generasi muda sebagai pewaris tongkat estafet keberlangsungan nilai dan ajaran agama.[40]

Oleh karena itu, posisi kiai harus dipahami betul oleh masyarakat, kiai menjadi sosok yang berdiri di atas semua golongan dan semua kepentingan. Merujuk pada peran pokoknya sebagai lentera bagi umat, sebagaimana institusi pesantren. Kiai memiliki dua peran pokok yang amat berat.[41]

Pertama, kiai hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai pendidik (murobbi). Visi besar kiai dalam hal ini ialah, akan lahir generasi - generasi bermutu yang amanah. Kiai tidak saja bertanggung jawab untuk membimbing santri dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga membiasakan praktek hidup yang selaras dan sesuai dengan ajaran dan nilai Islam.

Kedua, kiai adalah dai (pendakwah) yang punya tugas bagaimana menerangi masyarakat dan menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Adapun tugas kiai adalah bagaimana menjaga nilai-nilai itu tetap lestari, diikuti, dan dipraktekkan oleh masyarakat. Makanya dakwah ialah media dalam

---

[40] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa*, 44
[41] *Ibid....*, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan sebuah kebenaran dan keluhuran nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat.

Secara garis besar, ada dua model dakwah yang selama ini dikenal: dakwah *billisan* dan *bilhal.* Dai yang selama ini berbicara dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi, dan semacamnya tergolong dakwah *billisan.* Sementara, dakwah bilhal lebih menitikberatkan kepada teladan dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Perkataan, sikap, dan perbuatan kiai hendaknya menjadi teladan yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Dakwah *bilhal* merupakan model pendidikan yang cukup efektif dari pada sekedar dakwah *bilhal.*[42]

Di sinilah predikat kiai sebagai pewaris tunggal para nabi akan berfungsi sesuai dengan spirit perjuangan para nabi. Karena, sebagai pewaris para nabi, kiai secara otomatis memiliki amanat untuk meneruskan perjuangan mereka dalam ber *amar ma'ruf* dan ber *nahi munkar.* Dalam membela kaum *mustadl'afin, dhua'fa,* dan orang-orang yang tertindas, disamping masyarakat secara umum, sebab misi besar para nabi adalah menegakkan kedaulatan individu sebagai manusia dengan komitmen jihad sosial yang tinggi.[43]

Menurut Qurais Shihab, ulama (kiai) memiliki empat peran yang harus dijalankan sesuai dengan tugas kenabian.[44]

---

[42] *Ibid...*, 46
[43] *Ibid...*, 48
[44] *Ibid....*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama. Menyampaikan (tabligh) ajaran para nabi, sesui dengan firman Allah, "*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu*" (QS. Al-Maa'idah,5:67). *Kedua,* menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan ayat, "*dan, kami turunkan al-Kitab kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia.*" (QS, an-Nahl, 16: 44). *Ketiga,* memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan firman Allah, "*dan, allah turunkan bersama mereka al-Kitab dengan benar agar dapat memutuskan perkara yang diperlisihkan manusia.*" (QS. Al-Imran, 2" 213). *Keempat,* memberikan contoh pengalaman, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa perilaku nabi adalah praktek dari al-Qur'an.

Peran tersebut tentu saja memberikan gambaran bahwa ulama (kiai) harus mampu memosisikan dirinya dengan objektif sehingga peran-peran yang diberikan atas dirinya dapat diaktualisasikan dengan maksimal.

Peran yang terpenting dari kiai sebagaimana yang dikatakan oleh Hiroko Horikhosi, adalah sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan dikalangan ummat Islam[45]

---

[45] Achnad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* , 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Relasi kiai dengan masyarakat

Keberadaan kiai tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Sebab, masyarakat adalah medan, dimana kiai beramal dan berjuang menegakkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kiai dengan masyarakat ibarat gula dengan manis. Keterpautan keduanya tidak hanya dilandasi rasa saling membutuhkan, tetapi kiai ibarat hati bagi tubuh masyarakat.

Di mata masyarakat, kiai adalah sosok alim bijaksana yang setiap perilaku, tutur kata, dan pandangannya melahirkan kesejukan dan jalan terang bagi masyarakat. Legitimasi kiai kerap kali lebih berpengaruh di banding penguasa semisal raja. Di samping faktor bahwa kiai diyakini sebagai orang yang lebih dekat dengan Tuhan, kiai juga dekat dengan masyarakat dalam keseharian hidup mereka.

Pandangan masyarakat terhadap kiai tentunya sangat berbeda dengan pandangan mereka terhadap penguasa. Ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat kepada kiai sama sekali tidak dilandasi oleh keterpaksaan dan rasa takut sebagaimana yang lazim mereka alami terhadap penguasa. Di mata masyarakat, ketokohan kiai nyaris murni disebabkan sumbangsih riil kiai bagi mereka bukan karena kekuatan fisik atau kekuasaannya. Ketundukan masyarakat terhadap kiai ialah ketundukan yang pasrah dan tulus.

Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi dasar posisi kiai sangat signifikan. *Pertama*, tingginya derajat mobilitas kiai dalam membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan hubungan dengan komunitas diluarnya, baik sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan tertentu, sehingga bisa memperoleh informasi baru yang dimiliki santri dan masyarakat.

Kedua, posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan pesantren menjadikan mereka sebagai sumber-sumber rujukan bagi orang luar dari luar desa.

Ketiga, sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitar, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik[46]

Dalam masyarakat tradisional, seorang dapat menjadi kiai atau disebut kiai karena ia diterima masyarakat, karena orang yang datang minta nasehat kepadanya atau mengirimkan suatu arahnya kepada kiai. Ketokohan kiai sebagai penggerak moral dalam masyarakat menyatu tanpa ada jarak dengan masyarakat sekitarnya, dianggap sebagai sesepuh masyarakat yang melingkupi para santri juga terlibat dan menyatu dengan masyarakat guna memberikan inofasi moral dan budaya yang berkemanusiaan.[47]

Kadar nilai pengabdian kiai terhadap masyarakat pada seluruh tumpuhan persoalan masyarakat, kiai siap memberikan kesejukan solusi bagi

---

[46] Ibnu Hajar , *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa*, 60

[47] Badaruddin, *Kepribadian Kiai dala Pondok Pesantren,* (Jurnal Wacana Maret 2005), 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Karena itu kiai tidak pandang bulu terhadap keberagam bahkan selalu memintakan do'a agar padanya terbuka hati atas petunjuk Allah SWT. Dikatakan oleh Kiai Mustofa Bisri (2001: xxv) bahwa kiai melakukan diagnosa terhadap penyakit-penyakit kemasyarakatan dan berusaha mengobatinya, kiai siap menampung segala tumpuhan permasalahan masyarakat serta siap pula memberikan keteduhan pada mereka, kiai bagi masyarakat ibarat air telaga yang tenang dan menenangkan.[48]

Untuk itu dapat dirumuskan bahwa ketokohan, kepeloporan, kepedulian, kesederhanaan, dan keteladanan kiai dalam mendarma baktikan diri terhadap masyarakat (persoalan), kerumitan masyarakat selalu memberikan solusi yang menyejukkan guna menjaga kelestarian hubungannya dengan masyarakat[49].

B. Konsep Politik

a. Klasik

Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Filosof ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta), urusan-urusan yang menyangkut

---

[48] *Ibid...* 71
[49] *Ibid... 72*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada urusan-urusan yang menyangkut swasta.

b. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam satu negara. Menurutnya, negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang kongkrit, dan membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan.

c. Kekuasaan

Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di manapun kekuasaan itu ditemukan.

Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini. Di rumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dan masyarakat, yakni hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan.

d. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa setiap kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan dan nilai-nilai masyarakat.

Sementara itu, Lasswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. "mendapatkan apa" artinya mendapatkan nilai-nilai. "Kapan" berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. "Bagaimana" berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

e. Konflik

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu seringkali terjadi perbedaan, pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan berebutan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai ini disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik

Berawal dari kelima konsep tentang politik dirumuskan suatu konsep yang lebih komprehensif. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[50]

Definisi itu mengandung tujuh istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni interaksi, pemerintah, masyarakat, proses pembuatan dan

[50]Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan keputusan, yang mengikat, kebaikan bersama dan wilayah tertentu.[51]

Interaksi adalah berbeda dengan pengertian akse-reaksi, walaupun sama-sama merupakan hubungan. Sifat hubungan aksi-raksi itu searah. Hubungan dalam interaksi bersifat dua arah atau lebih. Reaksi atau respon yang timbul dalam interaksi tidak hanya ditentukan oleh aksi itu, tetapi juga oleh aksi yang lain. Reaksi juga ikut menentukan suatu aksi (tepatnya: besarnya aksi juga ikut dipengaruhi dari perkiraan besarnya reaksi. Hubungan antara pemerintahan dan masyarakat akan bersifat interaksi. Lain sistem politik lain pula derajat kedalaman dan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap pemerintah lebih besar pada sistem politik demokrasi (liberal) dibandingkan dengan sistem politik totaliter (baik komunis maupun fasis).

Pemerintah ialah semua lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan penegakkan peraturan (keputusan politik). Salah satu ciri khas pemerintah ialah kewenangannya membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum dalam hal ini, pemerintah merupakan mekanisme penetapan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

---

[51] *Ibid.*, 11-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa saja yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dapat dikategorikan sebagai politik, tetapi politik tidak terbatas pada kegiatan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah hanya salah satu unsur dalam proses politik. Yang dipelajari ilmu politik tidak hanya kegiatan lembaga pemerintah, tetapi juga kegiatan elit-elit yang melaksanakan fungsi-fungsi lembaga pemerintahan.

Masyarakat ialah (juga dalam arti yang luas), yakni seluruh individu dan kelompok. Yang berinteraksi dengan pemerintah tidak hanya kelompok dan organisasi masyarakat, tetapi juga individu anggota masyarakat. Kegiatan memilih wakil rakyat atau pimpinan politik dan pemerintahan (perilaku memilih) dan kegiatan-kegiatan lain seperti ucapan mempengaruhi pejabat pemerintah dengan kontak pribadi dan mengirim surat (partisipasi politik pada umumnya) merupakan sejumlah contoh interaksi individu anggota masyarakat dengan pemerintah.

Yang jadi pusat perhatian ilmu politik ialah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini, keputusan yang mengikat (otoritatif) tentang kebaikan bersama untuk suatu unit politik. Keputusan merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif, dan alternatif itu dapat berupa program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat- negara, dapat pula berupa elit-elit yang akan menyelenggarakan program-program. Berbagai program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat –negara disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula sebagai kebijakan umum sedangkan elit-elit yang menyelenggarakan kebijakan umum disebut pejabat pemerintah. Alternatif berupa program dan elit politik tidak selalu merupakan alternatif yang tak mengandung kelemahan dan dampak negatif sehingga keputusan politik seringkali merupakan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang kesemuanya memiliki kelemahan atau dampak negatif.

Keputusan berupa kebijakan umum menyangkut tiga hal. Yaitu penyerapan sumber-sumber materil dan manusia dari masyarakat (ekstraktif), distribusi dan alokasi sumber-sumber pada masyarakat (distributif), dan pengaturan perilaku anggota masyarakat (regulatif). Setiap tindakan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan akan menyangkut salah satu atau kombinasi dari dua atau tiga hal tersebut.

Kebijakan yang bersifat regulatif ialah penetapan sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi tidak hanya oleh warga masyarakat, tetapi juga oleh negara penyelenggara pemerintahan. Sejumlah peraturan diperlukan tidak hanya menciptakan keterlibatan dalam masyarakat dan demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif, tetapi juga untuk menjamin hak-hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maupun kelompok dominan yang lain dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interaksi yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik ialah kegiatan lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabatnya dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan karena pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik. Selain itu kegiatan berbagai kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sebab masyarakat berhak mempengaruhi proses politik. Termasuk dalam kategori terakhir ini berupa menentang, mendukung, mengubah, dan mengajukan alternatif lain dari kebijakan umum yang ada. Kecuali itu, mendukung, menentang, mengubah, dan mengajukan alternatif lain dari elit politik yang akan bekerja guna mengejar tujuan masyarkat.

Keputusan tentang kebaikan bersama ialah keputusan tentang tujuan masyarakat atau tentang negara dan masyarakat yang dianggap paling baik oleh seluruh anggota masyarakat (*general will bukan will of all*). Apa yang dianggap sebagai kebaikan bersama oleh suatu sistem politik mungkin berbeda dengan apa yang dianggap kebaikan bersama oleh sistem politik lain, tetapi perbedaannya dalam banyak hal lebih dalam derajatnya dari pada jenisnya (*not in kind but in degree*). Walaupun pengertian dan isi kebaikan bersama itu acapkali diperdebatkan, tetapi semua pihak sepakat, keputusan politik harus menyangkut kebaikan bersama atau kepentingan umum (*publik interest*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah tertentu ialah unit politik, seperti bangsa-negara (*nation-state*), Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Kongkritnya, ada keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi seluruh bangsa-bangsa, yakni keputusan yang dibuat oleh pemerintah nasional. Ada pula keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hanya suatu propinsi, yakni keputusan yang dibuat pemerintah daerah / propinsi. Demikian seterusnya sampai dengan keputusan desa. Dalam setiap sistem pemerintahan, pemerintah lokal mempunyai kewenangan membuat keputusan yang hanya berlaku didaerah tersebut. Yang berbeda dari suatu sistem pemerintahan dengan sistem yang lain menyangkut perihal derajat otonomi pemerintah lokal. Pendek kata, para ilmuan politik dewasa ini cenderung mempelajari interaksi antara pemerintah (sebagai lembaga maupun elit pemegang peranan) dan masyarakat (individu maupun kelompok). Dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama untuk seluruh masyarakat. Mereka memusatkan kajian pada pola perilaku politik para pembuat dan pelaksan keputusan politik, pada proses berbagai kelompok dan individu yang mempengaruhi keputusan politik, pada pengaruh kebijakan umum terhadap masyarakat, dan hubungan kehidupan politik dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikut sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.[52]

Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku tidak selalu berupa partisipasi politik.

Berikut ini dikemukakan sejumlah "rambu-rambu" partisipasi politik[53] *pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilaku. *Kedua*, kegiatan itu diarahkan

---

[52] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 140
[53] *Ibid*, 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik. *Kelima.* Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvisional*) dan tak berupa kekerasan (*nonviolence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk- rasa).

Kegiatan individu untuk mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri dan ada pula yang dilakukan atas desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain. Dalam kenyataan kedua hal ini sering kali sukar dibedakan maka baik kegiatan otonom maupun mobilisasi termasuk dalam kategori partisipasi politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk –bentuk tipologi partisipasi politik diantara:

a) David F. Roth dan Frank L. Wilson

David F. Roth dan Frank L. Wilson. Dalam bukunya *The Comparative Study of Politics,* Roth dan Wilson (1976) membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Intensitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik dikenal sebagai aktivis. Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai partisipan. Lapisan selanjutnya adalah kelompok pengamat. Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok orang yang apolitis. Yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. Mereka tidak memberikan sedikit pun terhadap masalah politik.[54]

b) Robert D. Putnam

pandangan Putnam tentang tipologi partisipasi politik. Dalam buku perbandingan Sistem Politik yang di sunting oleh Mas'oed dan Mac Andrewa (1981: 80-82), Putnam membuat suatu model skematis stratifikasi social politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari dalam berbagai tingkat kegiatan politik. [55] pada puncak piramida terletak kelompok pembuat keputusan, lapisan di bawahnya adalah kaum berpengaruh, lapisan selanjutnya adalah aktivis, kemudian

[54] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: kencana, 2010). Hal,183
[55]Ibid... hal, 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapisan berikutnya adalah peminat politik, lapisan selanjutnya kelompok pemilih dan lapisan terbawah adalah nonpartisipan.

c) Michael Rush dan Philip Althoff

Rush dan Althoff mengajukan hirarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hirarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukuan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti diperlihatkan oleh bagan Hirarki partisipasi politik di mana garis vertikal segitiga menunjukkan hirarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.[56]

D. Kiai dan Politik

Pasca reformasi banyak kiai terjun ke dalam dunia politik praktis. Para dai dan kiai kampung yang selama ini konsisten ngemung masyarakat dan menjadi wakil dari suara hati masyarakat pun ramai-ramai masuk dalam dunia politik praktis. Puncaknya jabatan strategis ialah ketika Gus Dur menjadi presiden, walaupun belum sampai akhir jabatannya sudah dipaksa turun oleh musuh-musuh politiknya[57].

---

[56] Ibid... hal. 185

[57] Ibnu Hajar , *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus ini menjadi tragedi suksesi kepemimpinan paling kotor dalam sejarah Indonesia. Gus Dur yang terpilih secara demokratis akhirnya dipaksa mundur dari kursi kepresidenan dengan alasan yang tertekan dipaksa-paksakan. Gus Dur adalah presiden pertama dari unsur kiai yang mengawali mencicipi kursi presiden, serta mengawali juga presiden dari unsur kiai yang mendapatkan perlakuan kurang bijak dari musuh-musuh politiknya.[58]

Dalam banyak ranah, keterlibatan sejumlah tokoh agama dalam birokrasi memang sedikit banyak dapat mewarnai reformasi minimal di tingkat kebijakan dan perundangan-undangan. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak lantas mampu mengurangi perilaku manusiawi yang terjadi dalam lingkaran sistem birokrasi yang dipegangnya, seperti perilaku korupsi, bahkan dapat dikatakan perampokan uang rakyat terus berlanjut dengan dibuktikan terbongkarnya perilaku itu kini setelah beberapa tahun mengendap dan tak kunjung terungkap[59]

Pernyataan diatas sama sekali tidak bermaksud mengait-eratkan keterlibatan kiai dalam politik dengan perilaku korupsi, akan tetapi keterlibatan kiai dalam politik belum mampu mengubah wajah birokrasi kita dan menjadikannya lebih baik. Bahkan, keterlibatan kiai dalam wilayah kekuasaan memunculkan kecurigaan baru dikalangan masyarakat terkait dengan kejahatan korupsi, karena kekuasaan sangat dekat tradisi korupsi, maka kiai yang sudah berada dalam lingkaran politik sama halnya dengan telah mulai masuk kedalam

[58] *Ibid*...hal. 78
[59] *Ibid*...79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jebakan sistem yang akrab dengan tradisi korup tersebut. Setidaknya, para kiai dapat mengaca pada pengalaman para aktivis NU ketika masih menjadi bagian dari kekuasaan politik, nuansa korupsi ini ternyata tidak bisa dipisahkan.[60]

Temuan penelitian Fealy menjadi dasar bagi argumentasi ini, menurutnya bahwa setelah PNI, NU merupakan partai yang paling banyak dikotori skandal korupsi.[61] Selama pertengahan hingga 1950-an para pemimpin NU ("kiai", penulis) menghadapi berbagai pengungkapan skandal di media, penyelidikan polisi dan proses peradilan atas tindak pidana korupsi.[62] Beberapa tokoh tersebut antara lain, Zainul Arifin, Djamaluddin Malik, R. Mohammad Kafrawi, dan Tang Eng Hong, bahkan kasus penyelidikan terkait skandal keuangan yang melibatkan Masjkur dan Dachlan juga mengemuka di media[63]

Temuan di atas merupakan fakta sejarah yang diungkap Fealy atas para tokoh-tokoh NU ketika dekat dengan kekuasaan. Mereka secara langsung ataupun tidak telah bersentuhan dengan tradisi korupsi, sekalipun mereka tidak melakukannya, tetapi sistem yang mengikat bisa saja menjebak mereka menjadi bagian dari tradisi korup tersebut. Demikian pula halnya yang terjadi dengan kiai-kiai yang telah menjadi bagian dari kekuasaan, tidak bisa dipungkiri, bau-bau korupsi tidak lepas dari mereka.

---

[60] *Ibid*...79-80

[61] Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta, LKS, 2003), 255

[62] *Ibid*...256

[63] *Ibid*...256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegagalan-kegagalan reformasi, sebagaimana disinggung di atas, bukan sepenuhnya kekeliruan atau ketidakmampuan peran para agamawan dalam mengelola birokrasi, tetapi paling tidak hal itu telah mencederai kepercayaan mayoritas masyarakat yang selama ini bertumpu dan memasrahkan kepercayaannya kepada figur kiai untuk mengisi jabatan-jabatan publik itu, apalagi jabatan yang diraih oleh para kiai tidak mudah didapatkan, namun diawali dengan janji untuk satu perubahan, terutama pada saat kampanye. Dalam konteks teologis, janji-apalagi janji yang diucapkan oleh seorang kiai harus dipenuhi, karena menghianati janji berarti berhutang kepada masyarakat yang pernah mendapatkan janji tersebut. Janji itu adalah perubahan yang sangat signifikan apabila kiai dapat menguasai posisi strategis dalam birokrasi. Akan tetapi, ketika janji tersebut tidak bisa dipenuhi karena mengubah birokrasi dan kebijakan tidak semudah membalikkan telapak tangan, masyarakat berhak menagih janji tersebut, dan boleh-boleh saja tidak mempercayai kiai ketika janji yang dijanjikan tidak kunjung dipenuhi.[64]

Saat tokoh agama atau kiai berpolitik maka akan muncul permasalahan. Bagi sebagian kalangan, kiai seharusnya tidak masuk ke kancah politik praktis, dan tetap berkonsentrasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Beberapa alasan yang dikemukakan, di antaranya, bahwa wilayah kiai adalah sakral, sedangkan dunia politik profan yang meniscayakan adanya muatan

---

[64] Ibnu Hajar , *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politis, akibatnya para kiai hanya dijadikan alat oleh kelompok tertentu.[65] Jika bepolitik praktis dan menjadi juru kampanye parpol, para kiai akan terjebak pada logika politik yang sering memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi kepentingan politik, yang ada gilirannya menggiring kearah logika kekuasaan yang cendrung kooptatif, hegemonik, dan korup. Akibatnya, kekuatan logika yang dimiliki kiai, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian terhadap masyarakat basisnya akan menjadi hilang, terkalahkan oleh logika kekuasaan tadi.

Sepintas argumen yang diajukan beberapa kalangan agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia, sebagian kalangan itu sepertinya menghendaki agar kesucian, keluhuran moral, dan tugas mulia para kiai yang ada harus terjaga dari comberan politik yang penuh dengan kenistaan. Bahkan, boleh dibilang mereka berusaha menyelamatkan para kiai dari godaan politik yang kotor. Apakah memang selalu demikian bahwa politik itu kotor. Menurut penulis, pernyataan tersebut perlu mendapat penerangan kembali sebagaimana telah penulis uraikan[66]

E. Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu hegeishtai. Istilah tersebut berarti yang berarti memimpin, kepemimpinan, atau kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Konsep hegemoni menjadi ngetrend setelah

---

[65] Suherman Ja'far. *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. (Yogjakarta Kanisius, 2009), 31

[66] *Ibid*...31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai penyebutan atas pemikiran Gramsci yang dipahami sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu.[67]

Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah:

Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (*ideology*) seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.[68]

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Melalui teori hegemoni. kiai dianggap memiliki kekuasaan atau kepemimpinan, yaitu sebagai ulama dan pengayon ummat.

Dengan demikian kekuasaan yang di peroleh kiai dapat dijelaskan sebagai berikut: proses perekayasaan, dalam pengertian bahwa kharisma tersebut diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan, yang disertai dengan moralitas dan kepribadian yang soleh, serta

---

[67]http://utchanovsky.com/2008/08/teori-hegemoni/
[68] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesetiaan menyantuni masyarakat, sehingga masyarakat rela dan mendukung kekuasaan kiai dan kiai juga di kenal sebagai ulama dan pengayom ummat.

F. Teori Kepemimpinan Kharismatik

Meminjam analisis Max Weber, kepemimpinan kiai sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada *personal leadership.* Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi umatnya *(client)* dalam sebuah relasi yang patermalistik. Kompetensi ulama dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat ulama senantiasa dijadikan sebagai referensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya dengan otoritas yang dimilikinya, ulama mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial-politik.

Selain kepemimpinan kharisma kepemimpinan kiai berupa kepemimpinan kebapakan (paternalistis) dengan kata lain dia menganggap bawahannya belum atau tidak dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan dengan bersikap melindungi. Sehingga dengan kepemimpinan kebapakan ini kiai akan lebih mudah mendapat kekuatan atau kekuasaan dari para pengikutnya.

Max Webber kelahiran Erfurt di Thuringia, Jerman, telah terdidik di bidang ekonomi dan hukum. Ia menjadi guru besar di Berlin University. Freibung, dan Heidelberg. Dia adalah tokoh filsafat sosial yang banyak menorehkan karya besar. Salah satu teorinya tentang kewenangan. Webber mengklasifikasikan menjadi tiga bagian. Ketiga tipe wewenang yaitu wewenang kharismatik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang tradisional dan wewenang tradisional[69]. Menurut Webber ada Tiga sumber kekuasaan yang penting, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi kharisma dan instrumen rasional[70].

Pertama, wewenang kharismatik, didasarkan atas ciri kepribadian luar biasa pemimpin. Pokoknya ialah mereka yang percaya akan kharisma, mempunyai keyakinan bahwa mereka melalui pemimpin diantar masuk kedalam dan diberi pengharapan baru. Ciri-ciri dari kharismatik ialah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa dirinya terpanggil untuk itu. Mereka tidak dilakukan karena keterpaksaan melainkan karena tulus.

Kedua, tipe tradisional didasarkan atas tradisi, adat-istiadat, atau perasaan spontan para pengikut. Orang menjadi pimpinan bukan karena bakatnya, melainkan karena sudah diatur demikian di masa lampau. Misalnya, anak mewarisi tahta ayahnya. Lembaga kepemimpinan dianggap suci dalam diri dan mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas dari soal kecakapannya atau dukungan mayoritas.

Ketiga, tipe rasional atau yang berdasarkan hukum, bertumpu pada prinsip, dengan berpedoman pada prinsip ini masyarakat atau Negara memilih pemimpinnya dan mengangkat dia untuk sementara waktu. Tipe wewenang ini

---

[69] Lihat Skiripsi Aridho Pamungkas, *Otoritas Kyai Pasca Oerde Baru di Kecamatan Wonocolo Surabaya,* Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 44

[70] Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (surabaya: LPAM, 2003), h. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umunya ditemukan pada Negara-negara demokrasi modern. Rakyat lebih percaya kepada akal kecerdasan, bakat kepemimpinan, dan objektivitas serta stabilitas undang-undang dari pada sifat luar biasa pemimpin kharismatik yang kadang-kadang hanya memiliki kecakapan yang kebetulan saja. Bentuk wewenang kharismatik cendrung untuk berubah menjadi bentuk rasional. Itu disebabkan oleh sifat sementara penampilan pimpinan kharismatik[71].

Menurut Webber tipe ideal birokrasi atau administradi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep ideal birokrasi Webwerian. Rasionalitas dan efesiensi dicerminkan dengan susunan hirarki adalah khusus merupakan kebutuhan yang amat mendesak pada saat itu. Dengan demikian ukuran rasionalitas efesiensi amat berbeda dengan kriteria untuk organisasi zaman modern sekarang yang kondisinya tidak sama dengan zamannya Max Webber[72]

G. Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial, seperti persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Semua berawal dari pertukaran, begitu kata tokoh teori pertukaran.

---

[71]Lihat Skiripsi Aridho Pamungkas, *Otoritas Kyai Pasca Oerde Baru di Kecamatan Wonocolo Surabaya,* Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 45

[72] Ibid... 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami teori ini lebih dalam kita akan membahas asumsi yang dikandung dalam teori ini.[73]

Teori Pertukaran Sosial. Sebagian besar rasa kepuasan kita bersumber pada tindakan manusia lain. Kepuasan di dalam cinta, rangsangan intelektual, persahabatan, kebutuhan ekonomi, keamanan dan banyak tujuan lain dalam hidup kita hanya dapat dicapai dengan menggerakkan orang lain agar berperilaku tertentu terhadap kita. Anggapan ini merupakan dasar teori pertukaran sosial, yaitu teori yang berpandangan bahwa manusia mengatur hubungan dengan orang lain dengan cara semacam membuat pembukuan mental yang mencatat imbalan, biaya dan laba. Teori Pertukaran Peter Blau Tujuan Peter Balu (1964) adalah untuk "memahami struktur social berdasarkan analisis proses social yang mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok.[74]

Peter Blau (1967), seorang ahli teori pertukaran sosial, mengemukakan bahwa jika manusia mau memperoleh manfaat dari hubungan dengan orang lain, mereka harus menawarkan cukup banyak hal kepada partner mereka agar yang bersangkutan merasakan adanya manfaat untuk tetap memelihara hubungan. Artinya bahwa seseorang harus memberikan penawaran yang lebih banyak secara timbal balik kepada orang lain untuk dapat memperoleh persahabatan. Dengan pola seperti ini prinsip penawaran dan permintaan menjamin bahwa

---

[73] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 60

[74] Ilham Fathoni. http://muiftaste.blogspot.com/2009/01/teori-pertukaran-sosial.html. 25/08/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang hanya akan memperoleh partner yang sama layaknya dengan apa yang mereka pantas peroleh.[75]

Peter Blau lahir di Wina, Austria, 7 Februari 1918. Bermigrasi ke AS tahun. 1939 dan mendapat kewarganegaraan AS tahun 1943. Pada Tahun 1942 mendapat BA dari Elmhurst College di Elmhurst, dan menyelesaikan program Ph.D. dari Univ. Columbia tahun 1952. Ia meninggal pada 12 Maret 2002. Karya-karyanya diantara lain: The American Occupational Structure , The Exchange and Power in Social Life Exchange, Struktural Contexts Opportunities, dan Crosscutting Social Circles. Ia mengembangkan sosiologi dari pendekatan mikro maupun makro, walaupun ia merupakan tokoh teori pertukaran, namun kajiannya banyak terfokus pada stratifikasi sosial[76].

Teori pertukaran sosial berasumsi bahwa orang memasuki dan meneruskan pola interaksi dengan orang lain karena mereka menganggap interaksi demikian itu menguntungkan, apapun yang menjadi alasannya. Tetapi di dalam proses mencari imbalan, orang pasti akan memikul biaya. Biaya menunjuk pada pertimbangan negatif seperti kewajiban, kelelahan, kebosanan, kecemasan, keprihatinan dan sebagainya, atau pada unsur positif yang dikorbankan dengan jalan tetap meneruskan hubungan. Keuntungan yang diperoleh dari pertukaran sosial menggambarkan perbedaan antara imbalan dengan biaya

---

[75] Ilham Fathoni. http://muiftaste.blogspot.com/2009/01/teori-pertukaran-sosial.html. 25/08/2010

[76] http://chabib.sunan-ampel.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/hand-out-teori-sos-modern-pdf. 25/08/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi teori pertukaran apabila kita pahami dari berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Horold H. Kelly maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai berikut: [77]

a. Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila: (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi percapaian tujuan-tujuan tersebut.

b. Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.

[77]Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal. 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Monografi Kelurahan Tonjung

1. Geografi

Untuk mengetahui mengenai obyek penelitian ini, agaknya perlu untuk menjelaskan lokasi penelitian obyek ini. Tonjung adalah nama sebuah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan propinsi Jawa Timur. Adapun luas tanah Kelurahan Tonjung adalah 789,790 M2 yang menjadi 12 RW (Rukun Warga) 27 RT (Rukun Tangga) dan terdiri dari 3,169 KK (Kepala Keluarga). Secara geografis, Kelurahan Tonjung dibatasi wilayah yang ada disekitarnya adapun batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Kapor, Arok dan Sobih

b. Sebelah Selatan : Desa Burneh

c. Sebelah Barat : Kecamatan Bangkalan

d. Sebelah Timur : Desa Benangkah

Adapun jarak Kelurahan Tonjung dengan jarak dari pusat Pemerintahah Kecamatan adalah 1Km, jarak dari Ibu kota Kabupaten / Kota adalah 5 Km, jarak dari Ibu kota Propinsi adalah 25 Km, dan jarak dari Ibu kota Negara adalah 1,027 Km

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tinggi rendahnya dari permukaan laut Kelurahan Tonjung terdapat pada 6 m diatas permukaan air laut dan suhu maksimum/minimum yaitu 32 C berdasarkan topografi (daratan rendah, tinggi, pantai) adalah rendah.

Adapun keseluruhan Kelurahan Tonjung adalah pola luas sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Pola Luas Wilayah Kelurahan Tonjung

No.	Status Tanah	Luas Tanah
1	Tanah Wakaf	33 ha
2	Tanah Sawah	
	• Irigasi Tehnis	268 ha
	• Irigasi Setengah Tehnis	152 ha
	• Irigasi Sederhana	16 ha
	• Irigasi Tadah Hujan	206,44 ha
3	Tanah Kering	
	• Perkarangan	160 ha
	• Perladangan	148 ha
	• Tegalan	158,755 ha
	• Perkebunan Rakyat	17, 855 ha
	• Tempat Rekreasi	1 ha

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[78]

[78] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kondisi fisik Kelurahan Tonjung pada umumnya baik. Sarana transportasi, komunikasi, maupun penerangan bukan merupakan masalah lagi bagi masyarakat.

2. Demografis atau Kependudukan

Berbicara mengenai penduduk tidak lepas dari wilayah orang yang menempati wilayah tertentu, hal ini bisa kita lihat dari berbagai suku, agama, mata pencaharian dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi Kelurahan Tonjung mempunyai jumlah penduduk 14,258 jiwa, yang terdiri dari: laki-laki berjumlah 7,276 orang dan prempuan berjumlah 6,982 orang. Jumlah keseluruhan ini terdiri atas 3,169 Kepala Keluarga (KK). Adapun jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Tonjung adalah terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7,276
2	Perempuan	6,982
Jumlah		14, 258

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[79]

[79] Monografi Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Kelurahan Tonjung menurut tingkat usia atau umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi Kelurahan Tonjung mempunyai jumlah penduduk 14,258 jiwa dengan rincian 7,276 Laki-Laki dan 6,982 perempuan.

Tabel 1.3

Sedangkan Stratifikasi Keseluruhan Masyarakat

Kelurahan Tonjung Menurut Usia.

No.	Umur	Jumlah (orang)
1	00-03	921
2	04-06	1,067
3	07-12	2,213
4	13-15	1,631
5	16-18	1,591
6	19-keatas	4,602

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[80]

3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kelurahan Tonjung memiliki beragam warna hidup sendiri dalam membina hubungan sosial masyarakat dengan cara menjalin kontak sosial antara anggota masyarakat melalui cara-cara tertentu guna memenuhi salah satu kehidupan di masyarakat. Di Kelurahan Tonjung sendiri sering mengadakan pengajian tiap bulan dan di pimpin langsung oleh para kiai yang ada di Kelurahan Tonjung khususnya kiai yang tidak ikut politik.

[80] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas warga Kelurahan Tonjung beragama Islam, dengan kultur santri. Di Kelurahan Tonjung terdiri dari beberapa Pondok Pesantren besar yaitu; Pondok Pesantren Darul Mustofa, Pondok Pesantren Darul Hijrah, Pondok Pesantren Ar-rohmany Al-Ishaqiy, Pondok Pesantren Al hikam dan Pondok Pesantren Darul Holil, pesantren merupakan ciri khas masyarakat Madura.

Kehidupan keagamaan yang kental Islamnya telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Kelurahan. Beberapa kegiatan sosial yang dapat dilihat di Kelurahan Tonjung antara lain: Adanya kerja bakti (gotong-royong) yang dilakukan biasanya untuk mengerjakan sarana-sarana umum seperti pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain.

Adanya ta'ziyah terhadap orang yang meninggal mulai dari penguburan sampai hari ketujuh oleh masyarakat untuk membacakan tahlil. Adanya kegiatan ibu-ibu Muslimat yang diadakan satu bulan sekali, arisan, dan kegiatan-kegiatan yang lain

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Tonjung seluruhnya adalah mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama mayoritas dengan kultur santri (Nahdhatul Ulama, NU). Masyarakat Kelurahan Tonjung sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

masyarakat Madura pada umumnya, bercorak budaya Islam, walaupun tidak terintegrasi secara total dengan budaya masyarakat Madura. Hal ini di latar belakangi oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua maupun dari lembaga pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren di Kelurahan Tonjung.

Kelurahan Tonjung ini terdapat berbagai agama. Adapun komposisi menurut agama di Kelurahan Tonjung terlihat pada.

Tabel 1.4 di bawah ini

No.	Agama	Pemeluk
1	Islam	12, 482
2	Kristen	21
	Jumlah	33,482

Sumber Data:Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[81]

Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Kelurahan Tonjung dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut :

[81] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.5 di bawah ini

Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Tonjung

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	11
2	Langgar/ musolla	994
3	Pondok Pesantren	6
4	Kiai/guru	10/50
5	Organisasi Keagamaan	1

Pada tabel di atas terlihat bahwa sarana ibadah yang ada di Kelurahan Tonjung sesuai dengan jumlah pemeluk agama Islam, sehingga tempat ibadah dijumpai adalah Langgar/ musolla 994 buah yang merupakan simbol keagamaan masyarakat madura, dan 6 Masjid. Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Tonjung memiliki simbol-simbol keagamaan seperti: *langgar* (tempat ibadah umat Muslim serupa surau), *masjid* (tempat ibadah yang berukuran lebih besar daripada *langgar*), Tempat ibadah sebagai tempat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan juga digunakan untuk ceramah agama atau kegiatan sosial seperti memperingati maulid Nabi, pembagian zakat, dan tempat pengajian. *pondok pesantren* dan *madrasah* (lembaga pendidikan semacam sekolah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Kelurahan Tonjung juga tidak terlepas dari peran kiai. berikut ini nama-nama kiai sebagai berikut:

Tabel 1.6 di bawah ini

Jumlah Kiai di Kelurahan Tonjung

No	Nama Kiai	Pengasuh Pesantren
1	KH. Fahruddin	PP. Salafiyah Holiliyah
2	KH. Ali Mahfud	PP. Darul Hijrah
3	KH. Mukaffi	PP. Darul Holil
4	KH. Muhlis	PP. Darul Mustofa
5	KH. Saiful Rijal	
6	KH. Nuruddin Arahman	PP. Al-hikam
7	KH. Ahmad Zaini	PP. Ar-rohmany Al-Ishaqi
8	KH. Abu Naim	PP. Mambaul Hikam
9	KH. Hoirul Anwar	PP. Mambaul Rohma
10	KH. Hadori	PP. Mambaul Rohma

5. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan formal, masyarakat Kelurahan Tonjung pada umumnya tingkat pendidikan yang datang keatas. Hal ini terbukti dari tingkat pendidikan lulus SD, lulus SLTP, lulus SLTA, lulus Akademi, lulus Diploma D-1. D-2, D3 dan lulus sarjana (S1-S3) atau Doktor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah pendidikan memang tidak akan terlepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana pendidikan yang ada menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak generasi yang akan datang

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	215
2	Sekolah Dasar / MI	363
3	SLTP / MTS	365
4	SLTA / MA	532
5	D1-D3	36
6	SARJANA (S1-S3)	76

Sumber Data:Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[82]

Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Tonjung terdiri dari TK, SD /MI, SMP, dan SMA, adapun kalau dilihat secara terperinci sarana dan prasarana pada Tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah
1	TK	5
2	SD / MI	21

[82] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	SMP	6
4	SMA	4

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[83]

6. **Ekonomi**

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tonjung pada umumnya sebagai PNS. TNI/POLRI, pedagang, buruh dan lain-lain. Data penduduk Kelurahan Tonjung menurut mata pencaharian dapat dilihat tabel 1,8 di bawah ini.

Tabel 1.9

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	691
2	TNI/POLRI	112
3	Swasta	194
4	Pedagang	279
5	Tani	2,380
6	Pertukangan	159
7	Buruh Tani	690
8	Pensiunan	109

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[84]

[83] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tonjung dapat di kategorikan masyarakat penghasilan sedang karena ditunjukkan dengan banyaknya baik itu negeri maupun swasta.

7. Politik

Masyarakat Kelurahan Tonjung selalu berpartisipasi dalam menentukan pilihan politik. Pada setiap suksesi politik baik itu momen pemilihan umum (Pemilu), pemilihan Presiden dan wakil Presiden, juga pemilihan kepala daerah sulit ditebak kecenderungan pilihan warga. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 1.10

Rekapitulasi Perolehan Kursi Pileg TK.II

Dapil dua meliputi Kecamatan Burneh, Tragah, Labang, dan kwanyar

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	PKB	1
2	PKNU	1
3	HANURA	1
4	PNBK	1
5	GRINDA	1
6	DEMOKRAD	1
7	PPP	1

[84] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.11

Hasil Pemilihan Gebenur dan Wakil Gubenur Jatim

Di Kelurahan Tonjung

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	KAJI	1752
2	SR	1287
3	SALAM	1983
4	ACHSAN	417
5	KARSA	1595

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[85]

Tabel 1.12

Rekapitulasi Hasil Pemilihan

Cagub dan cawagub Jatim Putaran kedua di kelurahan Tonjung

No	Nama Cagub dan cawagub	Jumlah suara
1	KAJI	1840
2	KARSA	6001

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[86]

[85] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007
[86] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.13

Perolehan suara calon presiden dan wakil presiden

Di Kelurahan Tonjung

No	Nama Capres dan Cawapres	Jumlah Suara
1	MEGA-PRABOWO	1,899
2	SBY-BUDIONO	5,221
3	JK-WIRANTO	1,009

Sumber Data: Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007[87]

Pasangan Capres dan cawapres Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono-Prof. Dr. Boediono masih mendominasi perdulangan suara di Kelurahan Tonjung pada pemilu 2009 lalu.

B. Tipologi Kiai

a. Kiai Politisi (partisipan)

Di bawah ini spesifikasi kiai yang masuk dalam kategori Kiai partisipan (politisi).

Pertama. golongan kiai yang terjun dalam politik praktis yang ditunjukkan dengan memiliki jabatan strategis pada salah satu partai atau menjadi anggota dewan DPRD Bangkalan.

[87] Monografi Kelurahan / Kelurahan Tonjung Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rush dan Althoff mengajukan hirarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hirarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukuan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti diperlihatkan oleh bagan Hirarki partisipasi politik di mana garis vertikal segitiga menunjukkan hirarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.[88]

Keterlibatan KH Abu Naim dalam kancah politik (sebagai Pengurus Partai) termasuk tipologi hirarki partisipasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff mengajukan hirarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif[89]

Kedua. Golongan kiai yang tidak terjun langsung pada politik praktis dan tidak pernah jadi salah satu pengurus partai melainkan kiai yang di maksud kiai yang memberikan dukungan pada salah satu calon tertentu atau menentukan sikap pilihan politik masyarakat dalam momen pilkada. Kiai yang di maksud ini adalah tipologi penonton dari Milbrath yaitu tipe penonton

---

[88] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: kencana, 2010). Hal, 185
[89]Ibid... hal 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi ketertarikan diri sendiri pada stimulasi politik, mengikuti pemilihan umum, berusaha mendekati orang lain untuk ikut memilih dengan cara tertentu. Yang di maksud golongan ini diantaranya:

1. KH. HADORI
2. KH. FAHRUDDIN

b. Kiai Non Politisi (Non Partisipan)

Di bawah ini spesifikasi kiai yang masuk dalam kategori Kiai Non Partisipan (Non Politisi).

Pertama. Kiai yang hanya berpartisipasi saat pemilihan umum saja. Di antaranya adalah KH. Ahmad Zaini, KH. Muhlis, dan KH. Nuruddin. Ketiga kiai tersebut termasuk kiai yang memusatkan perhatiannya pada pengajaran di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dengan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai.[90]

Kiai tersebut termasuk tipologi partisipasi politik dari Robert D. Putnam yaitu pandangan Putnam tentang tipologi partisipasi politik. Dalam buku perbandingan Sistem Politik yang di sunting oleh Mas'oed dan Mac Andrewa (1981: 80-82), Putnam membuat suatu model skematis stratifikasi

[90] Ending Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan,* Yogyakarta, LKIS, 2003, hal, 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari dalam berbagai tingkat kegiatan politik. [91]

Ketiga kiai tersebut termasuk lapisan kelompok pemilih (*voters*), yang di ajukan oleh Robert D. Putnam yaitu kelompok warga Negara yang melakukan aktivitas politik pada saat pemilihan umum saja. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar dari bangunan piramida stratifikasi.[92]

Kedua. Kiai yang sangat apatis atau kiai yang tidak pernah berpartisipasi dalam politik. Yaitu KH. Ali Mahfud. Beliau ini termasuk tipologi yang digagaskan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson Dalam bukunya *The Comparative Study of Politics,* Roth dan Wilson (1976) membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya.

KH Mahfud adalah kiai yang sangat anti politik dari hasil wawancara dengan beliau peneliti akan memperjelas kehidupan keseharian beliau. Ia kesehariannya selalu ada di di pesantren dan beliau sosok seorang yang tegas dan tidak percaya dengan politik yang ada di Indonesia karena beliau menganggap politik dari A sampai Z itu adalah kotor, bahkan beliau tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah untuk lembaga pesantrennya di

---

[91] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik,* hal, 186
[92]Ibid...hal 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangun, dan beliau menolak karena Ia menganggap pesantrennya lebih mulya dan lebih hikmah dan barokah dari pada pesantren yang diberi sumbangan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

KH Ali Mahfud termasuk tipologi lapisan terbawah dari piramida yang ditawarkan oleh Roth dan Wilson adalah kelompok orang yang apolitis. Yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. Mereka tidak memberikan sedikit pun terhadap masalah politik.

Selain Roth dan Wilson. Robert D. Putnam juga memberikan tipologi partisipasi politik. Pandangan Putnam tentang tipologi partisipasi politik. Dalam buku perbandingan Sistem Politik yang di sunting oleh Mas'oed dan Mac Andrewa (1981: 80-82), Putnam membuat suatu model skematis stratifikasi sosial politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari dalam berbagai tingkat kegiatan politik.[93] KH. Ali Mahfud termasuk tipologi partisipasi politik lapisan terbawah dari tipologi yang diberikan oleh Robert D. Putnam. Yaitu nonpartisipan, mereka yang tidak melakukan kegiatan politik

[93] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISA DATA

A. Tipologi Manifestasi Partisipasi Politik Kiai di Kelurahan Tonjung

Keterlibatan beberapa kiai di Kelurahan Tonjung dalam politik, maka bisa pula dipahami kenapa orang mau melakukan aktivitas politik. Alasannya adalah pertama, keterlibatan dalam aktivitas politik tidak merupakan ancaman bagi kehidupan dia secara keseluruhan. Kedua, aktivitas politik dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ketiga, aktivitas politik memenuhi kebutuhan material dan atau kebutuhan immaterial bagi kehidupannya.[94]

Berikut ini adalah tabel bentuk partisipasi politik kiai di Kelurahan Tonjung Burneh Bangkalan

Tabel 1.14

Bentuk Partisipasi Politik Kiai

No	Nama	Bentuk Partisipasi Konvensional
1	KH. Abu Naim	Menduduki jabatan tertentu
2	KH. Mukaffi	Mencalegkan Diri
3	KH. Saiful Rizal	Mencalegkan Diri
4	KH. Hoirul Anwar	Mencalegkan Diri
5	KH. Fahruddin	Memberikan Fatwa Politik/ memberikan suara
6	KH. Hadori	Memberikan Fatwa Politik/memberikan suara

[94] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.15

Hirarki Partisipasi Politik Kiai

No	Nama	Hirarki Partisipasi
1	KH. Abu Naim	Menduduki jabatan politik atau administrasi
2	KH. Mukaffi	Mencari jabatan politik
3	KH. Saiful Rizal	Mencari jabatan politik
4	KH. Hoirul Anwar	Mencari jabatan politik
5	KH. Fahruddin	Partisipasi dalam memberikan dukungan suara dalam pemilu
6	KH. Hadori	Partisipasi dalam memberikan dukungan suara dalam pemilu

Di bawah ini adalah tipologi manifestasi politik kiai di Kelurahan Tonjung diantaranya sebagai berikut:

1. Pengurus Partai

Pengurus partai adalah para pejuang yang mengelola organisasi politik agar menjadi mesin yang efektif bagi para pemimpin organisasi rakyat dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka. Pengurus partai haruslah orang-orang terpilih yang sangat menyadari bahwa yang dilakukannya adalah mengelola suatu alat perjuangan yang dapat digunakan oleh kekuatan-kekuatan rakyat (yang terorganisir) untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya agar dapat hidup lebih baik.

Salah satu bentuk keterlibatan kiai dalam politik khususnya di Kelurahan Tonjung adalah pengurus partai yaitu. Drs. KH. Abu Naim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KH. Abu Naim, beliau aktif di panggung politik di mulai dari lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tahun 1998-2004 Ia menjadi ketua PAC PKB Burneh dan 2007 sampai sekarang Ia menjadi wakil pengurus DPC PKB Bangkalan, kemudian beliau mencalegkan diri dari dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 beliau terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan dan periode 2009-2014 beliau tidak terpilih lagi padahal mendapat nilai suara yang banyak berhubung di cekal maka beliau tidak terpilih menjadi anggota DPRD. inilah gambaran dari politik.[95]

Keterlibatan KH Abu Naim dalam kancah politik termasuk tipologi hirarki partisipasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff mengajukan hirarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif[96]

KH. Abu Naim memutuskan ikut kedalam panggung politik sebenarnya beliau ditunjuk oleh beberapa kiai untuk menjadi pengurus PKB dan sebenarnya beliau menolak dan akhirnya Ia luluh karena guru besarnya.[97] Keterlibatan KH. Abu Naim memutuskan ikut dalam politik termasuk alasan tradisional yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial.[98]

---

[95] Wawancara dengan K.H. Abu Naim. Tonjung. 17/05/2010
[96] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal, 185
[97] Wawancara dengan K.H Abu Naim. 17/05/2010
[98] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal. 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap hormat, takzhim dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai utama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu mutlak dan diperluas, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya, kepatuhan ini, bagi pengamat luar, tampak lebih penting dari pada usaha menguasai ilmu; tetapi bagi kiai hal itu merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1985: 18)

Modal politik KH. Abu Naim: sebelum beliau terjun ke dalam politik praktis beliau banyak berhubungan langsung atau berinteraksi dengan masyarakat mungkin dari inilah yang mengantarkan Ia menjadi anggota DPRD Bangkalan pada periode 2004-2009.[99] Interaksi komunikasi politik dipahami sebagai suatu tindakan timbal balik: bukan tindakan sepihak atau satu arah, tetapi tindakan dua arah mungkin karena interaksi atau berhubungan langsung dengan masyarakat. KH Abu Naim bisa terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan dalam dua periode

Miriam Budiardjo dalam buku *Pengantar Ilmu Politik*,(2005). Memberikan pengertian bahwa "komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi yang berjalan baik menjadi prasyarat sosialisasi politik untuk dapat berjalan dengan baik pula, sehingga budaya politik dapat dilangsungkan dengan baik[100]

[99] Wawancara dengan K.H Abu Naim. 17/05/2010
[100] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Hal, 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamanto Sunarto (2004), dalam bukunya sosiologi menjelaskan pengertian gerakan sosial sebagai perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya[101]

Menurut KH Abu Naim Sumbangsih yang pernah beliau berikan dalam proses politik: setelah Ia diantar oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Bangkalan, sumbangsih yang beliau berikan kepada masyarakat salah satunya meloloskan proyek pengaspalan jalan di Desa Kampek, Laskembang dan Desa yang lainnya, serta pembangunan madrasah dll.[102]

Keterlibatan KH. Abu Naim dalam politik beliau merasa ada implikasi atau dampak positif dan negatif. Dampak positif keterlibatan beliau dalam politik: Ia mengetahui lika liku politik khususnya di Bangkalan dan sekaligus tugas pokok anggota legislatif yaitu control, penganggaran dan perundang-undangan atau perda.

Sedangkan dampak negatifnya, beliau akui ketika tokoh atau kiai terjun dalam politik kharismanya menurun dan menjadi sorotan, omongan dan perbincangan masyarakat contoh ketika di DPRD terjadi masalah keuangan keliru atau ada yang korupsi, semua anggota legislatif khususnya di Bangkalan akan kena dampak negatifnya juga.[103]

---

[101] *Ibid*... hal, 130.
[102] Wawancara dengan KH. Abu Naim. 17/05/2010
[103] Wawancara dengan KH. Abu Naim. 17/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mencalegkan Diri

Era reformasi membawa perubahan konstelasi politik secara fundamental. Bergulirnya angin reformasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa partai Islam tampaknya memberi angin segar bagi posisi ulama Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai telah membuka peluang bagi partisipasi dari berbagai elemen masyarakat secara luas, terutama kalangan kiai. Kiai menjadi sosok yang memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik semacam ini.[104]

Keterlibatan kiai di Kelurahan Tonjung dalam politik selain menjadi pengurus partai ada yang mencalegkan diri, Dalam hal ini keterlibatan kiai dalam politik jangan dipandang sebagai persaingan antar kiai yang ada di Kelurahan Tonjung melainkan menjadi salah satu wadah untuk proses demokratis dalam kehidupan politik ditandai dengan adanya mekanisme mekanisme yang terbuka untuk merebut kekuasaan-kekuasaan formal.

---

[104] Achnad patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara kiai yang mencalegkan diri adalah:

1) **KH. Hoirul Anwar**

Keterlibatan KH. Hoirul Anwar dalam politik secara langsung di mulai pada pemilihan caleg tahun 2009 di dapel dua meliputi kecamatan Trageh, Burneh, Kwanyar dan Labeng. Melalui pos politik PKNU dan beliau terpilih juga menjadi anggota DPRD Bangkalan.

Beliau memutuskan ikut politik karena berbagai alasan diantaranya:

a) Demi memajukan Islam
b) Demi pesantren semuanya yang ada di Bangkalan karena kalau tidak ada orang-orang seperti saya mungkin dunia pesantren tidak akan diperhatikan
c) Untuk mensejahterakan ummat adalah tujuan utama beliau ikut politik dan di baliho beliau pada masa kampanye mengambil tema (SEMOGA BERMANFAAT BAGI UMMAT) ummat yang beliau maksud semua ummat atau semua keyakinan atau agama yang ada di Bangkalan. [105]

Motif keterlibatan kiai dalam politik di dasari oleh landasan untuk memperjuangkan Islam, institusi pesantren, permintaan masyarakat, dan merasa terpanggil untuk ikut politik. Dan aktivitas politik dalam pandangan kiai adalah untuk memperjuangkan kepentingan ummat melalui ikut terjun dalam politik. Dengan pandangan ini mudah-mudahan kekuasaan yang dimiliki kiai kemudian diabdikan lagi untuk masyarakat

[105] Wawancara dengan K.H. Anwar, Tonjung. 15/04/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kekuasaan yang diperoleh juga berangkat atas dukungan dari masyarakat.[106]

Modal Politik: Modal politik KH. Anwar yaitu, usaha dengan mengajak atau musyawarah dengan masyarakat dan beliau bermasyarakat dengan semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dengan sendirinya memilih beliau. Dan yang paling utama meminta kepada Allah dan tawakkal kepadanya

Sumbangsih beliau dalam proses politik yang bisa dilihat secara nyata yaitu, meloloskan proyek pengaspalan jalan raya dan tentunya beliau akan meningkatkan layanan masyarakat selama Ia mampu.[107]

2) KH. Mukaffi

Keterterlibatan KH. Mukaffi dalam politik: dimulai tahun 1997 awalnya ada di PDIP dan beliau pindah ke PPP DAN sekarang Ia menjadi pastisipan partai PNBK. Beliau dulu menjabat sebagai wakil DPC PDIP Bangkalan kemudian hijrah ke PPP selama 2 tahun, kemudian tahun 2009 beliau mencalegkan diri, melalui partai PNBK dan Ia terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan.[108]

KH. Mukaffi memutuskan ikut politik karena beliau merasa terpanggil untuk menyalurkan aspirasi rakyat lalu siapa lagi yang akan membela rakyat dan beliau ikut politik dengan ittikad akan memberikan

---

[106] Achnad patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik.* Hal, 186.
[107] Wawancara dengan KH. Anwar. 15/04/2010
[108] Wawancara dengan KH. Mukaffi, Tonjung. 15/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil yang terbaik. Sebenarnya salah satu ittikadnya ingin menampung aspirasi masyarakat untuk di sampaikan khususnya masyarakat Islam karena kita orang Islam. Salah satu contoh masalah budaya misalkan tidak kita awasi melalui lembaga DPRD yang ditakutkan kemaksiatan semakin merajalela dan budaya jelek akan masuk khususnya di Bangkalan ini semisal ada café, discotik dll. Disinilah peran serta kiai ikut dunia politik agar bisa menyelamatkan hal-hal yang lebih baik.[109]

Menurut KH. Mukaffi bahwasannya Islam tidak melarang berpolitik selama politik itu untuk hal yang positif. Dan politik itu adalah cara, menurut beliau politik itu sangat erat hubungannya dengan hal sosial dan juga terkait dengan budaya. Misalkan tidak ada kiai yang terjun di dunia politik lantas siapa yang akan memagari atau menjaga kelestarian budaya, sosial dll.

Aktivitas politik dalam pandangan kiai adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui kekuasaan. Dengan pandangan semacam ini, berpolitik adalah manifestasi dari ibadah kepada Allah. Prioritas orientasi politik kiai tidak lain sebagai perintah agama. Oleh karenanya, landasan berpolitik memperoleh dasar legitimasi agama yang kokoh[110]

---

[109] *Ibid*

[110] Achnad patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik.* Hal, 187-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal Politik: diantaranya adalah salah satunya niat baik, saling berkumpul dengan masyarakat, oleh karena itu, jadi beliau merasa hasil berkumpul dengan masyarakat atau berinteraksi yang membawa Ia menjadi anggota DPRD Bangkalan.[111]

Dalam memahami kewibawaan kiai ini, setidaknya terdapat dua kerangka yang harus diperhatikan, yakni:

Pertama, kewibawaan yang diperoleh oleh seorang kiai secara *given*, seperti tubuh besar, suara yang keras, dan mata yang tajam, serta adanya ikatan genealogis dengan kiai kharismatik sebelumnya.

Kedua, proses perekayasaan, dalam pengertian bahwa kharisma tersebut diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan, yang disertai dengan moralitas dan kepribadian yang saleh, serta kesetiaan menyantuni masyarakat.[112] Setidaknya, dua dimensi sosial itulah yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan pengaruh yang dimiliki ulama di tengah-tengah masyarakat,

Sedangkan sumbangsih yang pernah beliau berikan dalam proses politik ialah jalan yang belum di aspal beliau perjuangkan untuk diaspal.

---

[111] Wawancara dengan, KH. Mukaffi. 15/05/2010

[112]Lihat Abdul Rozaki, *Menabur Kharisma Memuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi menurut KH Mukaffi selain memperjuangkan aspirasi masyarakat beliau akan meningkatkan layanan masyarakat selama Ia mampu.[113]

3) KH. Saiful

Keterlibatan KH. Saiful dalam kancah politik mulai tahun 1999 menjadi partisipan PPP dan Ia mencalonkan diri menjadi untuk menjadi wakil rakyat dan sekarang beliau terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan melalui Partai PNDK. KH. Saiful memutuskan ikut politik karena ada beberapa alasan[114]. diantaranya:

Pertama, Merasa terpanggil untuk membela masyarakat. *Kedua*, kita mempunyai suatu panutan seorang tokoh berpolitik karena tokoh ini adalah panutan masyarakat sehingga kalau seorang kiai tidak berpolitik dalam hal positif maka masyarakat juga akan menganut pada siapa kalau kiai tadi hanya seorang qona'ah yang hanya sekedar mengajar saja tapi disitu ada nilai-nilai positif kenapa kiai harus terjun berpolitik karena untuk menyelamatkan nilai-nilai yang jelek atau sistem yang kotor jadi harus dirubah dan di control langsung oleh seorang kiai disinilah di butuhkannya peran seorang kiai dalam berpolitik.

Modal Politik: Modal politik KH Saiful diantaranya: bersosialisasi terhadap masyarakat atau pendekatan terhadap masyarakat. Ketika KH. Saiful menjadi anggota DPRD Bangkalan periode 2004-2009 beliau

[113] Wawancara dengan, KH. Mukaffi. 15/05/2010
[114] Wawancara dengan KH. Saiful, 14/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang oleh masyarakat sudah terbukti memang benar-benar membela masyarakat atau beliau itu memang pernah merealisasi kebutuhan masyarakat jadi mungkin masyarakat masih percaya pada beliau sehingga beliau masih terpilih lagi menjadi anggota DPRD Bangkalan

Menurut KH Saiful keterlibatan kiai dalam politik khususnya di Kelurahan Tonjung jangan di lihat sebagai persaingan antar kiai, kenapa kiai khususnya di Kelurahan Tonjung banyak yang ikut politik kenapa politik tidak di jadikan satu arah politik inilah pembelajaran bagi masyarakat bahwa kita punya hak untuk memilih siapa saja artinya tidak serta merta dalam satu keluarga besar harus menjadikan suara politik bersatu dan ini jangan dinilai sebuah persaingan tapi ini adalah bagian dari demokrasi masyarakat biar paham bahwa politik arah nya kearah seperti ini kalau kita nanti diarahkan satu partai beliau menerima seperti itu, tapi tidak semua orang bisa menerimanya dan ini lagi-lagi sebuah pelajaran bagi santri dan masyarakat bukan kita pecah dalam satu keluarga besar tapi ini bagian dari multi demokrasi.[115]

Menurut Afan Gaffar dalam bukunya politik Indonesia transisi menuju demokrasi (2006). Pemilihan umum dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas

[115] Ibid...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.[116]

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empiric. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan" Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".[117]

Katerlibatan kiai di Kelurahan Tonjung dalam politik, modal politiknya hampir sama yaitu bermasyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bersosialisasi terhadap masyarakat. Untuk menganalisa lebih tajam modal politik kiai ini digunakanlah teori pertukaran

Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial, seperti persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak

---

[116] Afan Gaffar. *Politik Indonesia Transisi Memuju Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal, 8

[117] Ibid...hal, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari soal pertukaran. Semua berawal dari pertukaran, begitu kata tokoh teori pertukaran. Untuk memahami teori ini lebih dalam kita akan membahas asumsi yang dikandung dalam teori ini.[118]

Asumsi teori pertukaran apabila kita pahami dari berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Horold H. Kelly maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai berikut: [119]

Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila: (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi percapaian tujuan-tujuan tersebut

Asumsi dari Blau ni, menurut Poloma (1984), juga sejalan dengan pemikiran Homans tentang pertukaran. Perilaku sosial terjadi melalui interaksi sosial yang mana para pelaku berorientasi pada tujuan[120]. Untuk memperoleh dukungan suara, misalnya, seseorang yang mencalegkan diri untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat, perolehan suara tersebut hanya mungkin dilakukan melalui interaksi dengan masyarakat. Perilaku untuk mendapatkan hasil maksimal agar lolos atau menjadi

[118] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 60
[119] Ibid...61-62
[120] Ibid...62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota DPRD memerlukan sarana bagi percapaiannya, misalnya, berhubungan persahabatan dan bermasyarakat melakukan interaksi dengan mengoreintasikan perilakunya untuk memperoleh suara atau dukungan yang banyak. Dengan cara tersebut pertukaran sosial bisa terjadi.

Meminjam analisis Max Weber, kepemimpinan kiai sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada *personal leadership.* Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi umatnya *(client)* dalam sebuah relasi yang patemalistik. Kompetensi ulama dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat ulama senantiasa dijadikan sebagai referensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya dengan otoritas yang dimilikinya, ulama mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial-politik.

Selain kepemimpinan kharisma kepemimpinan kiai berupa kepemimpinan kebapakan (paternalistis) dengan kata lain dia menganggap bawahannya belum atau tidak dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan dengan bersikap melindungi. Sehingga dengan kepemimpinan kebapakan ini kiai akan lebih mudah mendapat kekuatan atau kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Partisipan

Partisipasi politik adalah keterliibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Yang penting partipasi politik merupakan proses aktif seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional, yang bisa di anggap absah seperti menandatangani petisi atau mengikuti demontrasi damai, atau yang ilegal, seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak.[121]

Keterlibatan kiai di Kelurahan Tonjung dalam politik selain menjadi pengurus partai, mencalegkan diri, dan partisipan (bukan pengurus partai dan tidak mencalegkan diri) karena tidak terlibat aktif dalam politik, kiai partisipan ini sekedar menentukan sikap politiknya atau memberikan dukungan kepada calon tertentu dalam pemilu (legislatif dan eksekutif).

---

[121] Keth faunlks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, (Bandung: Nosa Media, 2010), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara kiai yang berpartisipasi dalam pemilu adalah:

1. **KH. Hadori**

Menurut KH Hadori, beliau ini bukan politisi bukan aktivis bukan orang yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, melainkan memberikan dukungan kepada calon tertentu atas perintah guru/kiai. Beliau lakukan hanya di pemilu, selesai pemilu KH. Hadori hanya berkonsentrasi terhadap perjuangan Islam diantaranya mendidik santri, memberikan ceramah Agama kepada masyarakat. KH. Hadori memutuskan tidak ikut politik karena tidak memiliki kemampuan berpolitik, selain itu politik bukan dunianya.

Tapi beliau tidak menyalahkan kiai yang ikut politik justru beliau bersyukur karena kalau kiai tidak ikut politik maka kiai akan kecolongan, karena di pemerintahan itu ada sistem yang jelek maka harus ada kiai ikut politik untuk mengontrol hal yang jelek agar menjadi baik dan menegakkan atau melestarikan nilai-nilai islam[122].

Manfaat yang beliau terima karena tidak ikut dalam politik diantaranya: Beliau bebas bisa berteman dengan semua golongan dari berbagai kelompok politik karena beliau tidak terikat dengan politik sehingga beliau bebas berteman dengan semua orang

[122] Wawancara dengan KH. Hadori, Tonjung. 15/04/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau berpartisipasi dalam politik sekedar memberikan fatwa politik atau menentukan pilihan sikap politik masyarakat dalam pemilu (legislatif, eksekutif) karena ada dorongan dari guru (kiai) atau di intruksikan untuk mendukung salah satu calon tertentu misalnya kiai memerintah memilih calon A kita juga mengikuti pilihan kiai karena beliau *sami'na waato'na*, kemudian pilihan sikap guru besar (kiai) untuk di sampaikan kemasyarakat umum.[123]

Perintah (intruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang-orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau di pengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan.[124]

Sikap hormat, takzhim dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai utama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu mutlak dan diperluas, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya, kepatuhan ini, bagi pengamat luar, tampak lebih penting dari pada usaha menguasai ilmu; tetapi bagi kiai hal itu merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1985: 18).

Beliau menyadari dampak atau implimentasi memberikan fatwa politik kepada masyarakat, diantaranya berdampak negatif atau kerugian memberikan fatwa politik yaitu tantangan dari orang-orang lain misalnya

---

[123]Ibid...

[124] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teror terhadap diri pribadi dan keluarga bahkan bisa berdampak pada institusi atau lembaga pendidikan dll

Sedangkan keuntungan (positif) memberikan fatwa politik yaitu bisa menjadi masyarakat aman karena guru besar (kiai) yang memberi arahan untuk memilih salah satu calon dan masyarakat tidak akan bingung untuk memilih salah satu calon karena sudah di perintah oleh guru atau kiai.[125]

2. K.H. Fahruddin

Menurut KH. Fahruddin beliau tidak berpolitik karena Ia takut siapa yang akan mengurus ummat yang kurang baik atau jelek mau beliau luruskan walaupun beliau sendiri merasa masih jauh dari sempurna tapi beliau akan coba untuk menjadi orang yang lebih baik dari-hari kehari. Dan beliau juga tidak melarang siapapun berpolitik, baik itu kiai atau pengusaha asalkan berpolitik yang baik

Selain alasan diatas mengapa beliau tidak memilih ikut politik, karena politik itu bukan tempatnya. Alangkah enaknya tempatnya ya di tempati (ulama atau kiai jangan ikut campur haknya pemerintahan sebaliknya pemerintahan jangan ikut campur haknya ulama), jadi ada tempatnya masing-masing sebaik-baiknya pemerintah itu adalah mendatangi ulama untuk minta solusi yang baik insyaallah aman

[125] Wawancara dengan KH. Hadori. 15/04/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan ini kalau kita kembali pada hakikatnya Islam, karena ulama dan umara' harus bersatu untuk membuat bangsa yang maju dan berakhlak.[126]

Sedangkan manfaat yang beliau terima karena tidak berkecimpung dalam politik ialah sebetulnya orang yang tidak berpolitik tenang, enak dan tidak ada beban yang beliau pikirkan khususnya terkait politik. Pegangan orang hidup ada tiga *jujur, disiplin dan tanggung jawab*, jadi kalau ketiganya ini sudah dilakukan insyaallah kehidupan ini akan baik-baik saja. Antara pemerintah dan ulama harus menyatu karena ulama sebagai pondasi dan pemerintah sebagai tiangnya, karena antara pondasi dan tiang atapnya harus kompak, jadi atapnya tidak akan runtuh inilah kehidupan manusia. Menurut beliau politik dalam Islam tidak boleh anarkis tidak boleh marah monggo kita kalau ada masalah sebesar apapun harus mengadakan musyawarah antara dua pihak tapi jangan dilakukan dengan emosi karena kalau emosi tidak akan menemukan penyelesaian.[127]

KH. Fahruddin berpartisipasi dalam politik sekedar memberikan fatwa politik atau menentukan pilihan sikap politik masyarakat dalam pemilu (legislatif, eksekutif). Alasan beliau memberikan fatwa politik karena calon ini harus mempunyai jabatan karena kepribadian calon ini baik dan benar-benar membela rakyat. Alasan beliau berpartisipasi dalam

---

[126] Wawancara dengan, KH. Fahruddin, Tonjung. 15/05/2010
[127] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik termasuk aktivitas politik untuk memenuhi kebutuhan immaterial bagi kehidupannya. Dalam perspektif pertukaran, aktor merupakan makhluk yang rasional yang mempertimbangkan untung rugi bila melakukan suatu transaksi pertukaran (aktivitas) politik. Transaksi politik, tidak akan terjadi manakala para aktor yang terlibat tidak memperoleh sesuatu, keuntungan yang diperoleh bisa bersifat intrinsik seperti perhatian, pengayoman, dukungan, dan dorongan.[128]

Menurut KH. Fahruddin keuntungan atau dampak positif beliau memberikan fatwa politik untuk memilih calon si A karena dia baik dan akan membela rakyat bukan beliau pilih calon karena dia kiai atau lainnya. Sedangkan kerugian atau dampak negatif misalnya beliau pilih Si A dan Si B tidak di pilih ini sudah negatif (saudara jadi lawan dan kawan jadi lawan)

Untuk menganalisa keterlibatan KH. Hadori dan KH. Fahrud, menjadi partisipasi dalam politik yaitu mengajukan tipologi partisipasi politik dari Mich Rush Dan Philip Althoff.

Rush dan Althoff mengajukan hirarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hirarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah

[128] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukuan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti diperlihatkan oleh bagan Hirarki partisipasi politik di mana garis vertical segitiga menunjukkan hirarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.[129] KH. Hadori dan KH. Fahrud termasuk tipologi hirarki keanggotaan pasif suatu organisasi politik.

Keterlibatan kiai dalam politik di Kelurahan Tonjung bukan fenomena baru. Dalam sejarah Islam di Indonesia, hampir tak pernah dipisahkan keterlibatan kiai dan tokoh agama dengan politik. Pada zaman awal Islam, Nabi Muhammad adalah negarawan dan politisi ulung. Dengan kemampuan yang dimiliki, Nabi Muhammad bermain hampir di semua lini kehidupan, baik sipil maupun militer. Ketika Nabi memilih panglima perang, cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir militer dan politik. Begitu pula dengan zaman sesudahnya sampai sekarang[130]. Dasar empirik inilah yang menjadi motivasi kiai ikut politik.

Keterlibatan kiai dunia politik adalah bagian dari *fardlu kifayah*. Artinya, seluruh umat Islam ikut menanggung dosa jika tak ada satupun umatnya yang peduli dengan politik, karena politik adalah bagian dari

---

[129] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, hal, 184

[130] Suhermanto Ja'far, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*, hal, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamika kehidupan yang tidak bisa di tolak kehadirannya. Sama halnya, jika seluruh umat Islam terjun di dunia politik, sehingga melupakan tugas dakwah, pendidikan, ekonumi, social dan keagamaan, maka seluruh umat Islam ikut terbebani dosa. *Fardlu kifayah* adalah "kewajiban keterwakilan", jika sudah ada yang mewakili maka gugurlah kewajiban itu[131].

B. Pro Kontra Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kiai Dalam Politik

1. Pro (mendukung)

Keterlibatan kiai dalam wilayah politik kekuasaan melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat yang pro berpendapat, bahwa keterlibatan kiai dalam politik bermanfaat paling tidak karena dua hal. Medan dakwah kiai semakin luas tidak hanya di wilayah kultural seperti biasanya, tetapi juga merambah wilayah struktural.[132]

Hal serupa diungkapkan Muktafi salah satu tokoh masyarakat Tonjung dia memaparkan:

> keterlibatan kiai dalam politik itu bagus karena ada yang memikirkan lembaga seperti pesantren dan dia berharap keikut sertaan kiai dalam politik agar bisa merubah sistem yang jelek menjadi baik dan untuk berdakwah.[133]

---

[131] Ibid...hal, 41

[132] A. Dardiri Zubairi *Kiai politik, politik Kiai* *http://masdardiri.wordpress.com/2009/02/26/selamat-datang/.* pendapat senada juga di ungkapkan oleh tokoh masyarkat yakni Muktafi dan Muslim, dan juga salah satu pedagang Sainal Arif dan juga di ungkapkan oleh beberapa santri yakni Hoirul Anwar, Holili, Nanang Kosim dan Rofik

[133] Wawancara Dengan Muktafi Tokoh Masyarakat Tonjung. 16/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat peneliti akan menajamkan argumentasi bahwa keterlibatan kiai didalam politik diharapkan oleh beberapa kiai untuk kembali pada visi semula yakni "*amar ma'ruf nahi munkar*". Dan juga mengharap kepada kiai untuk menyampaikan dan membela aspirasi politik ummat atau masyarakat. Dan kiai yang berpolitik harus mengikuti jejak politik gusdur. Politik yang baik, berpihak kepada rakyat dan membesarkan nama baik Islam

Menurut Hoirul Anwar santri dari PP Darul Hijroh yang juga menjabat sebagai ketua umum pesantren PP Darul Hijroh dia menginginkan:

> sah-sah saja kiai berpolitik asalkan tidak sampai mengganggu peran kekiaiannya dan dia berharap kepada kiai yang ikut politik agar memperbaiki atau menjaga nilai-nilai agama dan Ia menginginkan kiai yang ikut politik harus dibatasi semisal satu kecamatan hanya di wakili satu kiai saja agar tidak membingungkan masyarakat. [134]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Holili (santri) dari pesantren Ar-rohmany Al-Ishaqi:

> sah-sah saja kiai ikut politik karena kiai juga punya hak dan mungkin kiai ikut politik juga karena ia ingin memiliki jaringan yang luas dan berdakwah juga.[135]

Menurut Rofik yang menjabat ketua umum Pondok Pesantren Darul Mustofa, Ia juga mahasiswa salah satu perguruan swasta di Bangkalan dia memaparkan:

---

[134] Wawancara dengan Hoirul Anwar Santri PP Darul Hijroh. 16/05/2010
[135] Wawancara dengan Holili Santri PP Ar-rohmany Al-Ishaqi. 12/04/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menurut dia kiai boleh berpolitik asalkan jangan lupa pada tanggung jawab pada santri dan masyarakat kalau kiai tidak ikut politik lantas siapa yang akan memikirkan lembaga seperti pesantren, madrasah dll dan mudah-mudahan kiai yang ikut politik memang benar-benar ikhlas untuk membela kepentingan masyarakat khususnya terkait dengan Islam.[136]

Hal senada juga diungkap salah satu santri Al hikam yakni Nanang Kosim menurut dia:

> tidak apa-apa kiai ikut politik kalau memang tulus untuk membantu masyarakat bukan karena kepentingan pribadi menurut saya itu bagus ikut politik kalau memang tulus membantu masyarakat[137]

Menurut Muslim salah satu tokoh masyarakat Tonjung yang rumahnya berdampingan dengan pondok pesantren PP Darul Mustofa:

> bahwa keterlibatan kiai dalam politik praktis khususnya di Kelurahan Tonjung sebenarnya itu adalah turun temurun dari keluarganya jadi bagi dia tidak ada masalah kiai ikut politik asalkan berpolitik yang bagus[138]

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pedagang warga Tonjung yakni Sainal Arif:

> kiai boleh berpolitik tidak ada yang salah kiai ikut politik asalkan berpolitik yang Islami dan saya sarankan kiai yang ikut politik khususnya di Kelurahan Tonjung harus ingat kepada rakyat karena tanpa rakyat atau masyarakat siapapun tidak mungkin menjadi anggota dewan karena rakyat adalah sumber utama dari dukungan.[139]

---

[136] Wawancara dengan Rofik Santri PP Darul Mustofa. 16/05/2010
[137] Wawancara dengan Nanang Kosim. 16/05/2010
[138] Wawancara dengan Muslim Tokoh Masyarakat Tonjung. 16/05/2010
[139] Wawancara dengan Sainal Arif, Tonjung. 17/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kontra (Menginginkan Kiai tidak Ikut Politik)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan santri sepintas, mengajukan argumen yang diajukan oleh beberapa kalangan tersebut agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia. Sebagian kalangan itu menghendaki posisi kiai harus netral dan menjaga kesucian, keikhlasan, moral dan tugas mulia kiai tetap terjaga agar tidak dipengaruhi oleh bingar-bingar arus politik yang sangat panas ini. Jadi kiai lebih tepat jangan ikut politik karena kekuasaan justru menjadikan kerja-kerja kultural kiai terabaikan, lebih baik memposisikan kiai yang netral, kiai diharapkan memberikan ketenangan dan mensejukkan politik yang panas menjadi dingin.

Tetapi yang kontra sebaliknya berpendapat bahwa keterlibatan kiai dalam wilayah politik kekuasaan justru menjadikan kerja-kerja kultural kiai terabaikan. Oleh karena itu menurut pandangan yang kontra, sebaiknya kiai di wilayah kultural saja sambil menyuarakan kebenaran dari luar struktur.[140]

Menurut salah satu santri yang kontra atau menginginkan kiai tidak ikut politik yakni Ahmad Fausi salah satu santri pondok pesantren Darul Hijroh yaitu:

> dia menginginkan kiai cukup mengajar santri dan memberikan petunjuk yang baik kepada masyarakat dan kiai tidak usah ikut politik.[141]

---

[140] A. Dardiri Zubairi ***Kiai politik, politik Kiai http://masdardiri.wordpress.com/2009/02/26/selamat-datang/.*** Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Fausi, Rustam, Mukrim, Toher dan Muhdari

[141] Wawacara dengan Ahmad Fausi Santri PP Darul Hijroh. 16/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena petuah kiai adalah obat bagi setiap problem masyarakat dalam hal apapun. Tidak hanya dalam persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan ekonomi, pertanian, nafkah hidup, hingga persoalan-persoalan rumah tangga, sosok kiai begitu dekat di hati masyarakat. Pintu rumah kiai laksana masjid yang kapanpun orang datang bertamu selalu terbuka napas dan detak jantung kiai adalah pengabdian bagi kemaslahatan dan kebahagiaan masyarakat.[142] masyarakat mengharapkan posisi kiai kembali pada sosok kiai yang sangat dekat dengan masyarakat dan sering memberi arahan-arahan beserta kumandang lafal-lafal Al Qur'an yang sangat menyejukkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua RT 01-06 yakni Menurut Rustam yang juga PNS di rumah sakit Bangkalan mengungkapkan yaitu:

> sebenarnya kiai lebih tepat tidak ikut politik karena kiai mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yaitu mendidik santri dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat lebih-lebih terkait dengan hal keagamaan.[143]

Menurut pak Mukrim salah satu petani Kelurahan Tonjung yang menginginkan kiai tidak berpolitik Ia memaparkan yakni:

> dia menginginkan kiai tidak usah ikut politik, bahkan masyarakat Tonjung khususnya di dusun Bun Alas sudah ada keresahan terhadap kiai yang ikut politik ada omongan dari masyarakat (kalau lagi butuh aja kiai terjun ke masyarakat sekarang tidak ingat atau lupa pada bawahan setelah menjadi anggota dewan).[144]

---

[142] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa* (Jokjakarta: IRCiSOD, 2009) h. 8

[143] Wawancara dengan Rustam PNS. 13/04/2010

[144] Wawancara dengan Mukrim Petani, Tonjung. 17/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga diungkapkan oleh Toher yang juga salah satu tokoh masyarakat:

> saya sendiri menginginkan kiai tidak usah ikut politik karena takut tidak bisa mengimbangin tugasnya sebagai kiai dan sebagian masyarakat Tonjung menginginkan kiai ikut politik dan sebagian menginginkan tidak ikut politik[145]

Hasil wawancara dengan pak Mukrim peneliti semakin tahu kasus yang terjadi di tubuh masyarakat bahwa keberadaan kiai tidak selalu terjun langsung atau silaturrahmi dengan masyarakat khususnya kiai yang ikut politik hal ini diperkuat dengan adanya steatmen oleh beberapa masyarakat yang diungkapkan oleh pak Mukrim kepada peneliti. Dimana kepemimpinan kiai sudah berubah. Posisi tersebut telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai sekaligus mengelupasnya sakralitas kiai di mata masyarakat. Nama besar kiai telah menunjukkan pergesaran makna khususnya bagi kiai yang ikut politik karena masyarakat menganggap kiai memanfaatkan masyarakat ketika pemilihan caleg karena menurut masyarakat ketika "butuh saja kiai sering berkoordinasi dengan masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu tapi sekarang tidak pernah berkoordinasi langsung atau silaturrahmi terhadap masyarakat. Mungkin salah satu alasan masyarakat menginginkan kiai tidak berpolitik takut tidak bisa mengimbangi waktu untuk masyarakat sehingga akhirnya menyita waktu untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat dan akhirnya masyarakat tidak dipikirkan lagi oleh kiai.

---

[145] Wawancara dengan Toher Tokoh Masyarakat, Tonjung. 17/05/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhdari salah satu tokoh masyarakat Tonjung yang menginginkan kiai tidak ikut politik yaitu:

> di sini itu masyarakat bodoh jadi kalau menurut dia keberadaan kiai itu cukup di butuhkan oleh masyarakat dan Ia menginginkan kiai tidak usah ikut politik karena lebih tepat bila mengurusi santri dan khususnya mengayomi dan memberi arahan atau petunjuk bagi masyarakat. Karena masyarakat butuh petunjuk atau petuah dari seorang kiai.[146]

Pandangan masyarakat terhadap kiai tentunya sangat berbeda dengan pandangan mereka terhadap penguasa. Ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat kepada kiai sama sekali tidak dilandasi oleh keterpaksaan dan rasa takut sebagai mana yang lazim mereka alami terhadap penguasa. Diantara masyarakat, ketokohan kiainya nyaris murni disebabkan sumbangsih rel kiai bagi mereka bukan karena kekuatan fisik atau kekuasaannya. Ketundukan masyarakat terhadap kiai ialah ketundukan yang pasrah dan tulus.[147]

Fakta demikian tentunya sangat dipahami oleh kiai sendiri menjaga hati dan kepercayaan masyarakat begitu menjadi penting bagi kiai. Segala pandangan, tindakan, dan perilaku kiai karena itu mesti selalu dilandaskan pada prinsip independensi dan tidak berpihak demi menjaga keharmonisan diantara berbagai golongan yang berbeda dalam masyarakat. Kiai mesti memosisikan diri diatas segala kepentingan masyarakat yang berbeda dan tampil sebagai pengayon yang bijak.[148]

---

[146] Wawancara dengan Muhdari salah satu Tokoh Masyarakat Tonjung. 16/05/2010
[147] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa.* h, 63-64
[148] Ibid...h, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Ia diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya pada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang, tanpa melihat tinggi rendah kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan keagamaan, seperti memimpin sembahyang lima waktu, memberikan khutbah jum'ah dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain[149]

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan santri sepintas, mengajukan argumen yang diajukan oleh beberapa kalangan tersebut agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia. Sebagia kalangan itu menghendaki posisi kiai harus netral dan menjaga kesucian, keihlasan, moral dan tugas mulia kiai tetap terjaga agar tidak dipengaruhi oleh bingar-bingar arus politik yang sangat panas ini. Jadi kiai lebih tepat jangan ikut politik lebih baik menposisikan kiai yang netral, kiai diharapkan memberikan ketenangan dan mensejukkan politik yang panas menjadi dingin.

---

[149] Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, 1982), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Implikasi Keterlibatan Kiai Dalam Politik

Keterlibatan kiai dalam politik ternyata tidak semuanya bernilai positif. Dunia politik sangat menggiurkan. Ia menghipnotis setiap warga Negara yang hobi politik: pengusaha, agamawan, kaum muda, mahasiswa, santri dan lain-lain.[150]

Keterlibatan kiai dalam politik membawa implikasi terhadap pesantren khususnya kiai yang mempunyai lembaga pesantren. Tapi bukan persoalan yang sangat serius karena kiai masih bisa mengatasinya rutinitas pembelajaran di pesantren dengan guru-guru yang sudah di siapkan oleh kiai, di sisi lain juga berdampak berkurangnya kesempatan untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat karena kiai sering keluar untuk berkoordinasi maupun untuk kepentingan politik. Ini di anggap oleh beberapa informan sebagai dampak negatif kiai ikut politik karena tidak bisa mengimbangi waktunya untuk masyarakat karena masyarakat juga membutuhkan petuah seorang kiai.

Bedasarkan fakta di lapangan tempat penelitian di adakan, peneliti akan menajamkan argumentasinya bahwa keterlibatan kiai dengan politik memang banyak menyita waktu untuk masyarakat, peneliti sendiri juga merasakan hal yang sama setiap mengadakan wawancara dengan salah satu kiai yang ikut politik, jarang bisa ketemu langsung dengan kiai karena kiai banyak berkoordinasi diluar bahkan ada kiai yang menolak untuk

[150] Suhermanto Ja'far, *Pasang Surut Politik Kaum sarungan*, hal. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancara. Tidak semudah yang kita bayangkan langsung berjumpa dengan kiai melainkan peneliti harus berulang kali untuk bisa bertemu dengan kiai yang ikut politik. Memang realitanya kiai yang ikut politik sangat menyita waktunya karena untuk politik

Di mata masyarakat, institusi kiai telah di cap tidak lagi suci dan harus disakralkan. Tidak ada lagi kepercayaan kepada kiai, apalagi dalam perkembangan berikutnya, banyak kiai yang malah kehilangan fungsi dirinya sebagai wakil rakyat, semakin membuat masyarakat memandang sebelah mata kepada sosok kiai: kiai juga sama saja dengan politisi yang lain. Bahkan yang sangat parah, di tengah-tengah masyarakat, berkembang wacana bahwa kiai telah menjadikan dunia politik sebagai wilayah baru untuk mencari penghasilan.[151]

Dalam asumsi masyarakat, banyak kiai yang memilih jalur politik hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, kepentingan masyarakat cendrung dinomorduakan. Dengan persepsi tersebut, ketidak kepercayaan terhadap kiai semakin mengental, bahkan kiai sudah tidak lagi mendapatkan posisi yang sangat terhormat di mata masyarakat, karena wajah kiai yang suci dan memantulkan cahaya kesejatian sebagai seorang panutan masyarakat, telah berubah memantulkan ambisi sebagai seorang figur yang "haus" akan jabatan dan harta.[152]

---

[151] Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa,* hlm. 135
[152]Ibid...hal. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti akan nmemaparkan terkait Keterlibatan kiai dalam politik, bahwa pada dasarnya muncul keprihatinan dari masyarakat agar kiai mempertimbangkan kembali pada pilihannya ikut politik karena banyak pihak menilai, terlalu banyak minus atau dampak negatif yang harus ditanggung, baik bagi diri kiai yang bersangkutan atau keluarga besar dan juga bisa berdampak pada institusi pesantren. Bahkan akan mengancam runtuhnya kharisma yang dimiliki kiai dan para pengikutnya akan meninggalkannya karena keterlibatan kiai didalam politik akan menggangu nilai moral kiai, karena politik dunia yang penuh dusta dunia yang penuh intrik dan dunia yang sarat kekentalan sistem korup

Implikasi keterlibatan kiai dalam politik juga terlihat dalam penambahan sarana fisik pesantren maupun perbaikan gedung yang ada. Hal ini diakui oleh beberapa informan penelitian baik itu kiai yang tidak terlibat politik maupun masyarakat biasa ini di anggap oleh mereka sebagai dampak positif kiai ikut politik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti akan menguatkan argument terkait dampak positif kiai ikut politik. Bahwa pada dasarnya daerah penelitian ini terkait pembangunan institusi pesantren khususnya pesantren yang dibawah asuhan kiai yang ikut politik memang banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan bisa dilihat berdirinya bangunan gedung-gedung bertingkat dan adanya penambahan lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya di Pondok Pesantren Darul Mustofa, sebelumnya keberadaan sekolah menengah kejuruhan (SMK). Di pesantren tersebut tidak ada dan sekarang sudah ada, SMK Darul Mustofa berada di bawah naungan salah satu kiai yang ikut politik. Kalau kita melihat tahun-tahun kemarin SMK biasanya terdapat di perkotaan sekarang sudah masuk di lembaga pesantren hal ini menguatkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik juga membawa hal positif terhadap perkembangan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah pada bab sebelumnya. Selain itu, juga di paparkan saran-saran yang mungkin dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya, khususnya bagi yang ingin memperdalam terkait kiai dalam politik

A. Kesimpulan

1) Penjelasan tentang ketelibatan kiai dalam politik dan manifestasi politik kiai

   Bentuk keterlibatan kiai di desa tonjung dalam politik, ada tiga bentuk. Pertama, sebagai pengurus partai dalam hal ini kiai menjadi pengurus partai sekaligus mencalegkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Kedua, sebagai aktor untuk mencalegkan diri yang berangkat dari beberapa partai yang berbeda tapi bukan menjadi pengurus partai. Ketiga, memberikan dukungan pada calon tertentu

   Motif keterlibatan kiai dalam politik di dasari oleh landasan untuk memperjuangkan islam, institusi pesantren, permintaan masyarakat, dan merasa terpanggil untuk ikut politik. Dan aktivitas politik dalam pandangan kiai adalah untuk memperjuangkan kepentingan ummat melalui ikut terjun dalam politik.

2) Penjelasan tentang pandangan masyarakat dan beberapa kiai terhadap kiai yang ikut politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pro (mendukung keterlibatan kiai dalam politik)

Kalangan yang mendukung kiai ikut dalam politik umumnya berpandangan bahwa politik ini harus ada nilai-nilai moralitas keagamaan, yang karenanya dibutuhkan campur tangan ulama untuk membenahinya, semakin banyak kiai ikut politik akan semakin bagus dalam artian kiai benar-benar niat baik.

b. Kontra (menginginkan kiai tidak ikut politik)

Sementara kalangan yang menginginkan kiai tidak ikut politik berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak mencampuri urusan politik, melainkan lebih berkonsentrasi pada sisi pendidikan akhlak dan moral masyarakat. Sepintas argument yang diajukan beberapa kalangan agar kiai tidak berpolitik sangar luhur dan mulia.

B. Saran

1. Keterlibatan kiai dalam politik harus dibatasi biar masyarakat tidak bingung untuk menentukan pilihan politiknya
2. Perlu ada kepekaan sosial yang mesti dilakukan kiai terhadap masyarakat khususnya kiai yang ikut politik agar eksistensi nama baik kiai tetap terjaga
3. Aktivitas kiai dalam politik benar-benar menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*
4. Peran pokok kiai jangan sampai terabaikan yaitu sebagai pembina santri
5. Kiai harus banyak berhubungan langsung dengan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Patoni, Achnad, 2007. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Hajar, Ibnu, 2009. *Kiai Di Tengan Pusaran Politik Antara Petaka Dan Kuasa,* Jokjakarta: IRCiSOD.

Dardiri Zubairi *Kiai politik, politik Kiai http://masdardiri.wordpress.com/2009/02/26/selamat-datang/*

Suprayoga, Imam, 2009. *Kiai Dan Politik,* UIN MALANG.

Arjuna Dewex http:*lkehadiran kiai independen dalam dinamika sosial-politik* //yazoulah.blogspot.com/2009/03/kehadiran-kiai-independen-dalam.htm

Miftah Faridl, *Jurnal Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, 6 Agustus 2007

Dhofier, Zamakhasyari, 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES.

Subakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.

Arikunto, Suharsimi, 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat, 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lihat Skiripsi Nurul Widayati,*Upacara Keleman dan Pandangan Masyarakat Islam di Kelurahan Plaosan Wonuayo Sidoarjo* Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya,

Ivan Afriani HS, "Metode Penelitian Kualitatif", http://www.penalaran-unm.org (17 Januari 2009)

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lihat B.Miles, Matthew & A.Michael Huberman, 2006. *Analisa Data Kualitatif* , yang di pertegaskan dalam bukunya Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,*jogjakarta: Jogjakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lihat Skripsi Ainur Rofiq, *Peran Kiai dalam Perubahan Sosial Politik pada masyarakat Sumber anyar Situbondo*. (Fakultas Dahwah, 2006)

Djaelani, Abdul Qadir, 1994. *Peran Ulama Dan Santri Dalam Perjalanan Politik Islam Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Feillard, Andree. 2007. NU Vis-a Vis Negara,LKIS,1999, 356 yang di pertegas dalam bukunya Achnad patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.

Djaelani, Abdul Qadir, 1994. *Peran Ulama Dan Santri Dalam perjuangan Islam di Indonesia*. Surabaya, PT Bina Ilmu.

Damsar, 2010. *pengantar sosiologi politik*, Jakarta: kencana.

Fealy, 2003. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, Yogyakarta, LKS.

Turmudi, Ending, 2003. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan,* Yogyakarta, LKIS,

Gaffar, Afan. 2006. *Politk Indonesia transisi menuju demokrasi,* Yogyakarta: pustaka pelajar.

Lihat Rozaki, Abdul, 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Faunlks, Keth, 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, Bandung: Nosa Media.

Ja'far, Suherman. 2009. *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. Yogjakarta Kanisius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id